

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD NEGERI BANGUNREJO 2
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Latifa Garnisti Rifani
NIM 12103241037

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2016**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD NEGERI BANGUNREJO 2 YOGYAKARTA" yang disusun oleh Latifa Garnisti Rifani, NIM 1210324037 telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Yogyakarta, 12 Agustus 2016
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd.
NIP 196011051984031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Latifa Garnisti Rifani

NIM : 12103241037

Jurusan : Pendidikan Luar Biasa

Fakultas : Ilmu Pendidikan

Judul : EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD NEGERI
BANGUNREJO 2 YOGYAKARTA

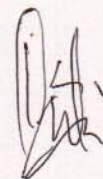
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.

Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam lembar pengesahan adalah asli.

Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, Agustus 2016
Yang menyatakan,



Latifa Garnisti Rifani
12103241037

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD NEGERI BANGUNREJO 2 YOGYAKARTA” yang disusun oleh Latifa Garnisti Rifani, NIM 12103241037 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 29 Agustus 2016 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd	Ketua Penguji		15/16 /09....
dr. Atien Nur Chamidah, M.Dis. St.	Sekretaris Penguji		14/16 /09....
Dr. Mami Hajaroh, M.Pd	Penguji Utama		14/16 /09....

Yogyakarta, 21 SEP 2016
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta



Dekan
Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian.”

(Shahih Ibnu Hibban)

PERSEMBAHAN

Seiring rasa hormat dan kerendahan hati,

Sebuah karya ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku Ibu Dra. Ismaryani dan Bapak Arif Widayat yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta mengiringi langkah putrinya selama ini.
2. Almamaterku tercinta, Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Agama, Nusa, dan Bangsa.

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD NEGERI BANGUNREJO 2 YOGYAKARTA

Oleh
Latifa Garnisti Rifani
NIM 12103241037

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, mencakup (1) mendeskripsikan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta sesuai atau tidak dengan delapan standar pendidikan inklusif yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, (2) mendeskripsikan berbagai hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, dan (3) solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala saat penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis evaluasi program dengan pendekatan model Discrepancy (kesenjangan). Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru kelas 1-6, dan guru pembimbing khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta belum sesuai dengan delapan standar pendidikan inklusif, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, (2) hambatan yang dihadapi adalah jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tersedia masih kurang dan minimnya pemahaman guru reguler tentang pendidikan inklusif, dan (3) solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala tersebut adalah GPK memberikan dampingan konsultatif kepada guru reguler, serta GPK dan guru reguler melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Kata kunci : *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sd Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan terutama dalam bidang Pendidikan Luar Biasa dan dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar kesarjanaan di bidang Pendidikan Luar Biasa. Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa bahagia perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan rekomendasi izin penelitian kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu serta memberikan kesempatan, arahan, solusi, motivasi, dan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Kepala Sekolah SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan tempat untuk mengadakan penelitian.
5. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Arif Widayat dan Ibu Dra. Ismaryani) yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
6. Teman-temanku (Anna, Carolina, Cecilia, Denis, Isti, Kinanthi, Rizta, dan Siti) yang selalu mengingatkan tentang skripsi dan memberikan semangat kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari semua pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat, atas segala kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Agustus 2016
Penulis,



Latifa Garnisti Rifani
NIM. 12103241037

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	13
1. Pendidikan Inklusif	13
a. Pengertian Pendidikan Inklusif	13
b. Tujuan Pendidikan Inklusif	15
c. Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif	16
2. Anak Berkebutuhan Khusus	40
a. Pengertian dan Macam-macam Anak Berkebutuhan Khusus	40
b. Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus	46

3. Evaluasi Program	49
a. Pengertian Evaluasi Program	49
b. Tujuan Evaluasi Program	51
c. Model-model Evaluasi Program	52
B. Penelitian yang Relevan	56
C. Alur Pikir	57
D. Pertanyaan Penelitian	60
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	62
B. Tempat dan Waktu Penelitian	63
1. Tempat Penelitian	63
2. Waktu Penelitian	63
C. Subjek Penelitian	63
D. Variabel Penelitian	64
E. Kriteria Evaluasi	64
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	69
G. Validitas Instrumen	82
H. Teknik Analisis Data	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	85
1. Deskripsi Lokasi	85
2. Deskripsi Data	87
a. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta	87
b. Kendala-kendala Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta	126
B. Pembahasan Hasil Penelitian	129
1. Ketercapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta	129

2. Solusi Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta	137
C. Keterbatasan Penelitian	139
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	146

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Skema Integrasi 8 Standar Nasional Pendidikan Dalam Bahasan Panduan	17
Tabel 2. Materi, Indikator, Sumber Informasi, dan Teknik Pengumpulan Data	71
Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Kuesioner	74
Tabel 4. Kisi-kisi Pedoman Observasi	77
Tabel 5. Rubrik Skoring Instrumen Kuesioner	78
Tabel 6. Kriteria Pencapaian	84
Tabel 7. Deskripsi Tenaga Kependidikan SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta	86
Tabel 8. Jenis dan Jumlah ABK di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta	87
Tabel 9. Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif	90
Tabel 10. Standar isi (Indikator Pencapaian Nomor 1)	93
Tabel 11. Standar Proses (Indikator Pencapaian Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8) ..	94
Tabel 12. Standar Kompetensi Lulusan (Pencapaian Indikator Nomor 9, 10, dan 11)	99
Tabel 13. Standar Penilaian (Indikator Pencapaian Nomor 12, 13, 14, 15 dan 16)	102
Tabel 14. Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (Indikator Pencapaian Nomor 17, 18 dan 19)	105
Tabel 15. Standar Sarana Prasarana (Indikator Pencapaian Nomor 20)	107
Tabel 16. Standar Pengelolaan (Indikator Pencapaian Nomor 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28)	109
Tabel 17. Standar Pembiayaan (Indikator Pencapaian Nomor 29 dan 30)	114
Tabel 18. Rangkuman Hasil Penelitian dan Judgement	116
Tabel 19. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Inklusif Bagi ABK di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta	128
Tabel 20. Tabulasi Data Jawaban Responden Instrumen Kuesioner	159
Tabel 21. Persentase Tingkat Pencapaian dan Tingkat Kesenjangan Indikator Pencapaian	161

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Alur Pikir	59
Gambar 2. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta Berdasarkan Komponen Penilaian	91
Gambar 3. Diagram Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta Berdasarkan Indikator Pencapaian	92
Gambar 4. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif Berdasarkan Komponen Penilaian Standar Proses	98
Gambar 5. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif Berdasarkan Komponen Penilaian Standar Kompetensi Lulusan	101
Gambar 6. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif Berdasarkan Komponen Penilaian Standar Penilaian	104
Gambar 7. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif Berdasarkan Komponen Penilaian Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	107
Gambar 8. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif Berdasarkan Komponen Penilaian Standar Pengelolaan	113
Gambar 9. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif Berdasarkan Komponen Penilaian Standar Pembiayaan	115
Gambar 10. Diagram Ketercapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta	129

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Instrumen Kuesioner	147
Lampiran 2. Pedoman Observasi	154
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah	155
Lampiran 4. Pedoman Wawancara Guru Kelas	156
Lampiran 5. Pedoman Wawancara Guru Pembimbing Khusus (GPK)	157
Lampiran 6. Tabulasi Data Jawaban Responden Instrumen Kuesioner	159
Lampiran 7. Tabulasi Tingkat Pencapaian dan Tingkat Kesenjangan Indikator Pencapaian	161
Lampiran 8. Hasil Observasi	163
Lampiran 9. Hasil Wawancara Kepala Sekolah	165
Lampiran 10. Hasil Wawancara Guru Kelas	167
Lampiran 11. Hasil Wawancara Guru Pembimbing Khusus (GPK)	170
Lampiran 12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta : Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta Tahun 2014	174
Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian	177
Lampiran 14. Surat Izin Penelitian	180
Lampiran 15. Surat Keterangan Penelitian	182

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alinea 4, menyatakan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang berarti membangun karakter bangsa yang berilmu pengetahuan. Untuk mewujudkan semua itu, tidak lain hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Pendidikan memungkinkan seseorang untuk berkembang secara maksimal, berpartisipasi penuh dalam pembangunan dan dapat memperbaiki kualitas hidupnya.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kata lain, pendidikan adalah usaha untuk membantu seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Dalam amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga ditekankan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan memajemukan bangsa. Setiap warga negara dijamin dan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ini berarti bahwa tidak ada pengecualian bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial.

Warga negara yang dimaksud adalah warga negara berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik, yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak dapat dikatakan berkebutuhan khusus apabila ada sesuatu yang kurang atau lebih pada diri anak di mana menunjukkan karakteristik khusus dalam pengenalannya.

Anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya untuk memperoleh pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus disebut dengan pendidikan khusus. Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kelainan, berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial. Tujuan dari pendidikan khusus

yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan jenis hambatan belajar, kebutuhan dan kemampuannya.

Penyelenggara pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan (Pasal 130 ayat 2 PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan). Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan kejuruan diselenggarakan secara inklusif. Di dunia internasional telah banyak langkah yang dilakukan untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Lahirnya pendidikan inklusif sejalan dengan deklarasi PBB mengenai Hak Azasi Manusia (HAM), yaitu hak pendidikan dan partisipasi penuh bagi semua orang dalam pendidikan. Keberadaan pendidikan inklusif juga didukung oleh deklarasi yang disepakati oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, antara lain adalah pernyataan Salamanca tahun 1994 mengenai hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengakuan terhadap perbedaan minat, kemampuan, dan kebutuhan dalam belajar. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan pada tahun 2006 telah mendeklarasikan hak-hak anak, dan ditegaskan bahwa semua anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, Pasal 1 menyatakan bahwa: Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan

kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Pendidikan inklusif mengakomodasi anak berkebutuhan khusus untuk dapat menerima pendidikan yang sama dengan anak pada umumnya tanpa mengacuhkan kelainan yang dialaminya. Di mana pendidikan inklusif memfasilitasi kelainan anak berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti pendidikan seperti anak pada umumnya.

Dengan memberi kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan, berarti memperkecil kesenjangan angka partisipasi anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, telah banyak sekolah yang menggunakan sistem pendidikan inklusif dalam penyelenggaraannya. Salah satu sekolah yang menggunakan sistem pendidikan inklusif dalam penyelenggaraannya adalah SD Negeri Bangunrejo 2. SD Negeri Bangunrejo 2 mampu menerima dan mengajar anak berkebutuhan khusus. Baik peserta didik dengan kelainan fisik, emosional, mental dan sosial.

Menjadi sekolah inklusi seperti SD Negeri Bangunrejo 2 membutuhkan berbagai hal yang berbeda dan pastinya mengalami kendala yang berbeda pula dengan sekolah umum lainnya. Setidaknya sekolah harus

mempersiapkan berbagai akomodasi dan penyesuaian agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa mengacuhkan jenis hambatan belajar yang dialaminya. Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif, sekolah inklusif perlu memperhatikan standar pelayanan minimum sekolah inklusif. Menurut Tim ASB (2011 : 30-31) Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif tercermin ke dalam 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional yang terintegrasi ke dalam 7 (tujuh) pokok bahasan dalam panduan, yaitu :

1. Isi (Pengembangan kurikulum dan penyusunan RPI sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus)
2. Proses (Penyesuaian pembelajaran, pendampingan GPK dan teman sebaya)
3. Kompetensi Lulusan (Program pengembangan bakat, program kompensatoris dan pelaksanaan UN bagi anak berkebutuhan khusus)
4. Penilaian (Penentuan KKM dan SKL, penyesuaian penilaian, dan pemberian STTB bagi anak berkebutuhan khusus yang mampu menyelesaikan pendidikan)
5. Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (Pelatihan guru reguler tentang pendidikan inklusif dan latar belakang pendidikan GPK)
6. Sarana Prasarana (Aksesibilitas fisik dan non fisik)
7. Pengelolaan (RPS, kebijakan sekolah dan laporan perkembangan sekolah oleh kepala sekolah secara sistematis)

8. Pembiayaan (Penyusunan RAPBS beserta pelaporan dana secara sistematis).

Sementara berdasarkan observasi awal di SD Negeri Bangunrejo 2, tantangan yang dihadapi antara lain :

Pertama,sekolah inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 dalam melaksanakan pendidikan inklusif belum melakukan penyesuaian antara kurikulum dengan tingkat kemampuan anak berkebutuhan khusus yang seharusnya tercermin dalam PPI. Sekolah baru memberikan pelayanan akomodasi dengan adanya bantuan GPK atau guru pembimbing khusus yang mendampingi siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran.

Kedua, peran GPK di sekolah tidak begitu besar, hanya sebatas mendampingi atau mengakomodasi anak dalam pembelajaran. Dalam merancang PPI, GPK tidak melakukan modifikasi sehingga pembelajaran yang anak dapatkan tidak sesuai dengan kemampuan dan jenis hambatan belajar anak. Dengan kata lain selama pembelajaran anak berkebutuhan khusus disamaratakan dengan anak siswa normal lainnya. Karena ketidaksesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan kemampuan siswa, maka dalam pelaksanaan evaluasi/penilaiannya sudah pasti tidak sesuai pula. Baik dalam pembelajaran hingga penilaian, anak berkebutuhan khusus disamaratakan dengan siswa normal lainnya. Yang membedakan hanya pada adanya pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus selama proses pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. GPK bertugas untuk

memberikan penjelasan lebih kepada siswa yang merasa belum jelas dengan materi yang diberikan. GPK juga bertugas untuk membantu siswa dalam hal menulis atau membacakan materi apabila siswa mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun pada pelaksanaan evaluasinya.

Ketiga, pada program evaluasi, apabila siswa dinyatakan tidak mampu mencapai standar kelulusan maka siswa akan diikutkan dalam program remedial. Program remedial di SD Negeri Bangunrejo 2 berupa remedial ujian dan merupakan tanggung jawab GPK dalam pelaksanaannya. GPK bertanggung jawab atas pembuatan soal yang sesuai dengan kemampuan anak. Namun karena tidak adanya asesmen secara berkala, maka GPK tidak mampu menentukan tingkat kemampuan siswa. Sehingga dalam pelaksanaan remedial dilakukan secara berulang kali yang berupa pengujian soal hingga mendapatkan soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Penilaian akhir dilakukan oleh guru kelas dengan kriteria ketuntasan minimum yang disamaratakan dengan siswa lainnya. Namun bedanya dengan penilaian siswa normal lainnya, guru kelas hanya memberikan nilai maksimal standar KKM kepada anak berkebutuhan khusus. Sehingga pemberian nilai akhir tidak sesuai dengan kemampuan siswa sebenarnya.

Keempat, sesuai dengan pernyataan di atas bahwa guru tidak melakukan modifikasi dalam pelaksanaan pembelajaran, berarti bahwa guru juga tidak menggunakan media ataupun metode pembelajaran yang dapat mengakomodasi anak berkebutuhan khusus. Selama pembelajaran berlangsung guru tidak membedakan penggunaan media maupun metode atau

tidak melakukan modifikasi terhadap media ataupun metode tersebut. Guru menyamaratakan anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal lainnya.

Kelima, tidak imbangnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus dengan jumlah guru pembimbing khusus. Di sekolah inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 memiliki beragam jenis kelainan anak berkebutuhan khusus dalam setiap kelasnya. Jenis kelainan anak berkebutuhan khusus tersebut di antaranya adalah anak tunagrahita yang berjumlah 25 orang, anak tunadaksa yang berjumlah 2 orang, anak autisme yang berjumlah 1 orang, anak *slow learner* yang berjumlah 29 orang, dan anak berkesulitan belajar yang berjumlah 2 orang. Jumlah anak berkebutuhan khusus di SD Negeri bangunrejo 2 melebihi setengah dari jumlah keseluruhan peserta didik yang ada yaitu 61 anak berkebutuhan khusus dari jumlah keseluruhan 108 anak. Sedangkan jumlah guru pembimbing khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 hanya berjumlah 4 orang GPK sekolah dan 2 orang GPK mandiri. Sehingga tidak sebanding dengan jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada.

Keenam, ketersediaan sarana prasarana yang aksesibel di sekolah inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 masih minim. Sekolah memiliki jalan yang landai dan kursi roda, namun untuk penggunaannya tidak sekolah manfaatkan dengan maksimal. Selain itu belum ada aksesibilitas lain bagi anak berkebutuhan khusus baik di dalam kelas, luar kelas, hingga kamar mandi sekolah.

Ketujuh, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, selama ini belum pernah dilakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Baik oleh pihak sekolah sendiri maupun dari luar pihak sekolah. Sehingga sekolah tidak mengetahui sejauh mana tingkat ketercapaian penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah dicapai dan aspek-aspek mana saja yang perlu diperbaiki.

Melihat banyaknya masalah dan ketidaksesuaian yang muncul dalam penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2, di mana perlu dikaji kembali standar penyelenggaraan pendidikan inklusif dari sekolah tersebut. Dengan pertimbangan itulah peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2. Evaluasi dapat diartikan juga penilaian. Evaluasi atau penilaian adalah penentuan pencapaian tujuan suatu program. Penilaian merupakan suatu bentuk sistem pengujian dalam pelaksanaan program evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui secara mendalam apakah terdapat kesenjangan dalam implementasi penyelenggaraan sekolah inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 dengan kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif. Berangkat dari pemikiran ini maka evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran perbandingan pencapaian program dengan standar mengenai penyelenggaraan pendidikan

inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SD Negeri Bangunrejo 2 sesuai dengan standar pelayanan minimum sekolah inklusif.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum sesuainya pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2.
2. Guru pembimbing khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 sudah ada, namun jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Bangunrejo 2.
3. Masih rendahnya prestasi belajar anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Bangunrejo 2.
4. Sarana prasarana di sekolah inklusi SD Negeri Bangunrejo 2 belum aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus.
5. Perlunya upaya perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 sesuai dengan standar pelayanan minimum sekolah inklusif.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas dan dengan keterbatasan peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di SD

Negeri Bangunrejo 2 yang mengacu pada kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 sudah sesuai dengan kriteria pelayanan minimum sekolah inklusif provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelenggaraan pendidikan sekolah inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

Hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta sesuai atau tidak dengan kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi siswa, guru dan pemangku kebijakan program pendidikan di sekolah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa

Hasil penelitian ini diharapkan anak berkebutuhan khusus mendapat pelayanan yang sesuai dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2.

b. Bagi guru dan kepala sekolah

Hasil penelitian ini dapat menggambarkan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Gambaran tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi guru dan pemangku kebijakan di sekolah inklusif dalam memperbaiki dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri Bangunrejo 2.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pendidikan Inklusif

a. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendapat mengenai pendidikan inklusif dari beberapa ahli memang memiliki keberagaman, namun pada dasarnya dari beberapa pengertian yang beragam tersebut memiliki makna atau inti yang sama. Dedi Kustawan (2012:8) menyatakan pendidikan inklusi adalah sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua individu tanpa terkecuali. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu.

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Hildegun Olsen (Tarmansyah, 2007:82) pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Dari pendapat ahli tersebut diketahui bahwa pendidikan inklusif terbuka bagi setiap anak yang berarti harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat, anak-anak jalanan, pekerja anak, anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termajinalisasi serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Pendapat

(Pernyataan Salamanca dan kerangka aksi tentang pendidikan kebutuhan khusus, paragraf 3). Pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. (Lay Kekeh Marthan, 2007:145). Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan yang mencakup semua anak tanpa terkecuali baik di tingkat SD, SMP, SMU, dan SMK.

Menurut Staub dan Peck (Tarmansyah, 2007:83), pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas. Pendapat ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainannya.

Dari beberapa pendapat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, maupun SMK).

b. Tujuan Pendidikan Inklusif

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) mengemukakan bahwa tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusif meliputi : tujuan yang dapat dirasakan langsung oleh anak, oleh guru, orangtua, dan masyarakat (Tarmansyah, 2007 :111).

Pasal 2 Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi Peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa , dijelaskan bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah :

- 1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.
- 3) Berkembangnya kepercayaan pada diri anak, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya.
- 4) Anak dapat belajar secara mandiri, dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari.

- 5) Anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, sekolah dan masyarakat.
- 6) Anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan, dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut.

Tujuan pendidikan inklusif dapat disimpulkan, adalah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak termasuk anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tanpa adanya perlakuan diskriminatif kepada semua peserta didik.

c. Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif

Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 tahun 2009 pasal 4 (1) menyatakan bahwa :

“Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap Kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)”

Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan yang mencakup semua anak tanpa terkecuali baik di tingkat SD, SMP, SMU, dan SMK, serta dalam penyelenggaraannya diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada semua tingkatan didasari oleh Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan. Ada 8 kriteria standar nasional pendidikan antara lain : isi, proses, kompetensi lulusan, penilaian, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Pada dasarnya kriteria tersebut memiliki keterkaitan sama lain, yang dapat direfleksikan melalui beberapa topik bahasan, antara lain : kurikulum, kualitas pengajaran, aksesibilitas (non fisik dan fisik), struktur organisasi, kebijakan, jejaring dengan masyarakat dan sistem dukungan jaringan.

Tabel 1. Skema Integrasi 8 Standar Nasional Pendidikan Dalam Bahasan Panduan

No.	8 STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL	BAHASAN DALAM PANDUAN
1. 2. 3. 4.	Isi Proses Kompetensi Lulusan Penilaian	1. Kurikulum a. Pengembangan Kurikulum (Adaptasi dan Modifikasi) b. RPI c. KKM & SKL d. Penilaian
5.	Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	2. Kualitas Pengajaran a. Pelatihan Guru b. Setting Kelas c. Materi Pengajaran dan Pembelajaran d. Strategi Pengajaran e. Dampingan Teman Sebaya f. Dampingan Konsultatif GPK g. Perekrutan dan Penempatan GPK
6.	Sarana Prasarana	3. Aksesibilitas (Non Fisik dan Fisik) a. Aksesibilitas Non Fisik (Sikap) b. Aksesibilitas Fisik c. Aksesibilitas Sekolah; Solusi Hemat Biaya
7. 8.	Pengelolaan Pembiayaan	4. Struktur Organisasi a. Pengakuan Resmi (SK) b. Koordinator Pendidikan Inklusif c. Pendataan d. Sekolah Membutuhkan Guru Terlatih

		<ul style="list-style-type: none"> e. Alokasi Dana Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif f. Keterlibatan Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Komite Sekolah <p>5. Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rancangan Rencana Pengembangan Pendidikan Inklusif b. Terbuka Pada Semua Anak c. Sosialisasi Pendidikan Inklusif Untuk Semua Warga Sekolah d. Ramah Terhadap Disabilitas e. Minimalisir Pengulangan Kelas <p>6. Jejaring Dengan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jejaring Dengan Orang Tua b. Sosialisasi Kepada Masyarakat <p>7. Sistem Dukungan / Jaringan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengenalan Sistem Dukungan b. Pihak-pihak Pendukung Pendidikan Inklusif
--	--	---

Sumber. Tim ASB (2011 : 32 – 33)

1) Standar Isi

Yang dimaksud dengan standar isi ialah kurikulum. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 SISDIKNAS Pasal 1 ayat (9), “Kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2006 : 10) kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa. Dari kedua pendapat tersebut menjelaskan bahwa kurikulum adalah program pendidikan

yang dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pembelajaran tertentu.

Kurikulum yang diterapkan di sekolah inklusi adalah kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP dan/atau kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya, kurikulum yang tepat bagi penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak dalam belajar (Tim ASB , 2011 : 32). Dari penjeleasan di atas diketahui bahwa kurikulum yang tepat bagi pendidikan inklusif mampu mengakomodasi pembelajaran bagi setiap anak tanpa terkecuali. Menurut Dedy Kustawan (2013 : 95) kurikulum yang bersifat inklusif adalah mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kemampuan, maka kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) akan lebih peka mempertimbangkan keragaman peserta didik agar pembelajarannya relevan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Jadi, kurikulum yang tepat untuk diterapkan di sekolah inklusif adalah kurikulum yang fleksibel dan mampu mengakomodasi kemampuan serta kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Tim ASB (2011 : 32-33) menyatakan ada dua pokok bahasan yang perlu diperhatikan dalam standar isi, yaitu pengembangan kurikulum dan rencana pembelajaran individual.

a) Pengembangan kurikulum

Permendiknas RI No. 19 tahun 2007 dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan inklusi menyatakan bahwa dalam pendidikan inklusif perlu ada penyesuaian kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik. Penyesuaian kurikulum dapat dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri atas kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait (Kemendiknas 2010:20). Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan kurikulum yang tepat diterapkan bagi pendidikan inklusif perlu dilakukan pengembangan kurikulum oleh tim interdisipliner dengan melakukan penyesuaian yang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu.

Menurut Tim ASB (2011:32) pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui 2 metode, yakni adaptasi dan modifikasi. Yang pertama adaptasi kurikulum, adaptasi kurikulum adalah pengadaan dan/atau penyesuaian instrumen (bahan) dan teknik (proses) pembelajaran yang dapat membantu anak untuk mengikuti tugas belajar yang sama dengan teman-temannya. Yang kedua modifikasi kurikulum, modifikasi kurikulum mengacu pada perubahan-perubahan kurikulum untuk kepentingan anak secara individual dengan mengurangi

kesulitan dan kuantitas tugas belajar anak. Sedangkan Dedy Kustawan (2013 : 96) berpendapat bahwa ada 5 (lima) model pengembangan kurikulum pendidikan inklusif dalam upaya penyusunan kurikulum yang fleksibel, yaitu (1) Model Eskalasi (Ditingkatkan), (2) Model Duplikasi (Meniru atau Menggandakan), (3) Model Duplikasi (Merubah untuk Disesuaikan), (4) Model Substitusi (Mengganti), dan (5) Model Omisi (Menghilangkan). Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas memang memiliki keberagaman, namun pada dasarnya dari beberapa pengertian yang beragam tersebut memiliki makna atau inti yang sama. Pada dasarnya pengembangan kurikulum dilakukan dengan adanya penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Penyesuaian yang dilakukan dapat melalui adaptasi maupun modifikasi dalam bentuk ditingkatkan, menggandakan, merubah untuk disesuaikan, mengganti, dan menghilangkan beberapa bagian kurikulum reguler untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak berkebutuhan khusus.

Tim ASB (2011:32) menyatakan bahwa pengembangan kurikulum secara tepat dan operasional dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil asesmen. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa asesmen berperan penting sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus.

Sehingga kurikulum yang dikembangkan akan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak saat ini yang sebelumnya diketahui melalui asesmen.

b) Rencana Pembelajaran Individual (RPI)

Menurut Allen & Glynn (1980 : 266) *The Individualized Education Program (IEP) is a blueprint for providing intervention services*. Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa Program Pembelajaran Individu (PPI) memiliki peran sebagai pendukung terlaksananya pelayanan intervensi terhadap ABK. RPI yang efektif dikembangkan melalui pendekatan terpadu terkait hasil asesmen yang bersifat medis, psikologis, dan akademik, serta disempurnakan dengan keterlibatan guru, dukungan GPK, orang tua anak berkebutuhan khusus, dan pihak-pihak terkait lainnya (Tim ASB, 2011 : 33). Sejalan dengan pendapat di atas, Allen & Glynn juga menyatakan bahwa RPI dikembangkan oleh tim belajar anak yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, baik multidisiplin ilmu, interdisiplin ilmu dan transdisiplin ilmu (1980 : 266). Dari kedua pendapat ahli di atas menjelaskan bahwa perancangan PPI melibatkan berbagai pihak, mulai dari interdisiplin ilmu hingga orangtua ABK itu sendiri. Hal ini dikarenakan pada umumnya ABK memiliki masalah yang kompleks, sehingga untuk mengatasinya

diperlukan keterlibatan berbagai ahli yang sesuai dengan permasalahan yang anak hadapi.

Tim ASB (2011 : 33) menyatakan pengembangan RPI harus diikuti dengan penyesuaian kriteria ketuntasan minimum (KKM) dan standar kompetensi lulusan (SKL). Dengan kata lain, RPI yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus adalah RPI yang dikembangkan berdasarkan hasil asesmen dan disesuaikan dengan KKM dan SKL yang ada oleh tim belajar anak yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga RPI yang dihasilkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan anak.

2) Standar Proses

Langkah pertama dalam pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif adalah dengan melaksanakan asesmen guna memperoleh informasi dalam bentuk apapun yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam mengembangkan kurikulum, RPI, media, materi maupun metode pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang anak berkebutuhan khusus dapatkan akan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak.

Selain mengembangkan kurikulum maupun RPI yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, dalam pelaksanaannya juga perlu mempertimbangkan materi belajar

maupun strategi mengajar yang akan diberikan kepada anak. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Menurut Dedy Kustawan (2013 : 101) bahan ajar memiliki posisi sebagai representasi (wakil) dari penjelasan pendidik di depan kelas atau di luar kelas. Penyusunan bahan ajar hendaklah berpedoman kepada standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan standar kompetensi lulusan (SKL). Namun bagi anak berkebutuhan khusus, materi belajar tidak dapat disamaratakan dengan anak normal, khususnya anak dengan kelainan intelektual. Dedy Kustawan (2013 : 102) mengatakan "... semestinyalah bahan ajar yang disusun di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan khususnya." Modifikasi bahan ajar berarti merubah bahan ajar peserta didik pada umumnya untuk disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kelainannya/hambatannya atau kebutuhan khususnya (Dedy Kustawan. 2013 : 102). Dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan isi atau substansi dari tujuan pendidikan yang harus peserta didik capai Pengembangan bahan ajar ini sangat penting karena realitanya memang dalam sekolah terdapat sebagian siswa yang mempunyai kelainan yang memerlukan layanan berbeda termasuk di dalamnya bahan ajar yang disajikan. Sehingga dengan adanya modifikasi bahan ajar, anak berkebutuhan khusus mampu menyerap bahan ajar yang disajikan.

Modifikasi bahan ajar bisa berkaitan dengan keluasan, kedalaman dan atau tingkat kesulitan.

Sama halnya dengan bahan ajar, dalam strategi pengajaran pun pada dasarnya anak berkebutuhan khusus memerlukan pengajaran yang baik, jelas dan aksesibel. Untuk itu diperlukan efektivitas komunikasi antara guru dan anak berkebutuhan khusus (Tim ASB, 2011 : 38). Sebagian besar guru reguler dapat mengembangkan strategi komunikasi untuk merespon kapasitas daya ingat (memori) anak yang berbeda-beda, baik memori visual, audio, maupun kinestetik (Tim ASB, 2011 : 38). Oleh karenanya strategi pengajaran harus disesuaikan dengan karakter komunikasi masing-masing anak berkebutuhan khusus guna merespon kapasitas daya ingat anak.

Dalam pembelajaran di sekolah inklusif, sumber belajar anak berkebutuhan khusus tidak hanya guru reguler maupun guru pembimbing khusus (GPK). Anak berkebutuhan khusus juga dapat belajar dengan pendampingan dari teman sekelas/sebayanya. Menurut Tim ASB (2011 : 41) penerapan strategi pendampingan teman sebaya sangat efektif dalam mempermudah proses pembelajaran dan juga membantu proses penerimaan anak berkebutuhan khusus di dalam kelompok siswa reguler di sekolah. Sejalan dengan pendapat Villa & Thousand yang menyatakan “*With partner learning or peer tutoring system, students receiving such instruction experience learning gains, interpersonal skill*

development, and heightened self-esteem” (2005 : 114). Dengan adanya pendampingan teman sebaya, anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan kemampuan interpersonal dan meningkatkan rasa percaya dirinya. Hal ini baik bagi keterampilan hidup bersosial anak. Tidak hanya itu, dengan adanya strategi pendampingan teman sebaya anak yang menjadi pendamping bagi anak berkebutuhan khusus juga dapat belajar bagaimana cara mendampingi dan memberikan instruksi kepada anak berkebutuhan khusus.

3) Standar Kompetensi Lulusan

Berdasarkan Permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan, peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti Ujian Nasional. Berdasarkan pendapat di atas menjelaskan bahwa kewajiban mengikuti Ujian Nasional berlaku kepada anak berkebutuhan khusus yang mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan sesuai atau di atas standar nasional pendidikan. Biasanya anak berkebutuhan khusus tersebut adalah anak yang memiliki intelektual normal atau di atas rata-rata. Sedangkan peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang di

selenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Biasanya anak berkebutuhan khusus tersebut adalah anak yang memiliki intelektual rendah dan ujian diselenggarakan oleh pihak sekolah itu sendiri.

4) Standar Penilaian

Evaluasi dapat diartikan sebagai penilaian. Menurut Anas Sudijono, evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya (2008 : 2). Dengan kata lain evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengukuran pencapaian hasil belajar siswa. Evaluasi di sekolah inklusi perlu memperhatikan berbagai aspek seperti tingkat kemampuan anak, kebutuhan anak dan jenis hambatan belajar anak sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga evaluasi di sekolah inklusi perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dengan jenis hambatan belajar yang dialami siswa. Agar informasi yang didapat sesuai dengan kompetensi peserta didik dan dapat digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran.

Menurut Dedy Kustawan (2012 : 71), ada 3 (tiga) penyesuaian di antaranya sebagai berikut : (a) Penyesuaian Waktu; (b) Penyesuaian Cara; dan (c) Penyesuaian Materi.

a) Penyesuaian Waktu

Penyesuaian waktu adalah penambahan waktu yang dibutuhkan oleh seorang peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengerjakan ulangan, ujian, tes dan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar.

b) Penyesuaian Cara

Penyesuaian cara adalah modifikasi cara yang dilakukan oleh pendidik dalam memberikan ulangan, ujian, tes dan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar bagi seorang peserta didik berkebutuhan khusus.

c) Penyesuaian Materi

Penyesuaian materi adalah penyesuaian tingkat kesulitan, bahan dan penggunaan bahasa dalam butir soal yang dilakukan oleh pendidik dalam memberikan ulangan, ujian, tes dan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar bagi seorang peserta didik berkebutuhan khusus.

Penentuan kelulusan mempunyai ukuran keberhasilan yang dikenal dengan istilah kriteria. Istilah kriteria dalam penilaian sering juga dikenal dengan kata “tolak ukur” atau “standar”. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik berkebutuhan khusus mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimum (Dedy Kustawan, 2012 : 25).

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) bagi anak berkebutuhan khusus yang mengikuti

kurikulum modifikasi dan memiliki RPI, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya (Tim ASB, 2011 : 33). Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa sama halnya dengan kurikulum dan RPI, KKM dan SKL bagi ABK tidak dapat disamaratakan dengan anak normal. Hal ini disebabkan ABK memiliki kebutuhan dan kemampuan belajar yang berbeda dengan normal. Sehingga dengan KKM dan SKL yang ditetapkan untuk anak normal, tidak sesuai untuk digunakan dalam mengukur pencapaian hasil belajar atau kemampuan ABK. Dengan kata lain, idealnya penentuan RPI, KKM, dan SKL anak mengacu pada hasil asesmen. Menurut Dedy Kustawan (2012 : 36) penetapan KKM dilakukan oleh Guru Pendidikan Khusus, Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Kelompok Guru Mata Pelajaran/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Berdasarkan permendiknas No 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan dalam Mohammad Takdir Illahi (2013 : 188), disebutkan bahwa.

- a) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Bukan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional di semua daerah di Indonesia. Biasanya sekolah inklusif akan menggunakan kurikulum adaptif yang menyesuaikan dengan kemampuan serta kondisi anak berkebutuhan khusus. Sehingga penilaian yang dilakukan tidak

dapat mengacu pada standar penilaian nasional melainkan kepada kurikulum adaptif agar hasil penilaian yang didapat sesuai dengan kemampuan siswa.

- b) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti Ujian Nasional. Hal ini berlaku kepada anak berkebutuhan khusus yang mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan sesuai atau di atas standar nasional pendidikan. Biasanya anak berkebutuhan khusus tersebut adalah anak yang memiliki intelektual normal atau di atas rata-rata.
- c) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Biasanya anak berkebutuhan khusus tersebut adalah anak yang memiliki intelektual rendah dan ujian diselenggarakan oleh pihak sekolah itu sendiri.
- d) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkonya dikeluarkan oleh pemerintah.

- e) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blangkanya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Karena ujian itu sendiri bukan dilakukan oleh pemerintah melainkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan atau sekolah itu sendiri.
- f) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Berdasarkan permendiknas No 20 Tahun 2007 laporan evaluasi hasil belajar perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Laporan hasil belajar perlu disampaikan kepada peserta didik dan peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remidi. Anak harus mengetahui nilai hasil belajar yang didapatnya sehingga anak mengetahui sejauh mana kemampuannya pada saat itu. Selain itu dengan anak mengetahui nilai hasil belajarnya, anak dapat menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran remedial apabila nilai yang didapat tidak mencapai KKM. Pemberian nilai hasil belajar

kepada siswa ini juga dapat memotivasi siswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.

- b) Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran disertai deskripsi kemajuan belajar. Hal ini berarti pendidik dalam menulis hasil penilaian yaitu berupa angka yang menunjukkan hasil kemampuan peserta didik dan disertai dengan gambaran tentang kemampuan peserta didik. Selain itu pengumuman ranking dalam kelas secara terbuka perlu diperhatikan. Karena dapat menimbulkan dampak psikologis yang negatif terhadap peserta didik. Bagi sekolah inklusif, penilaian yang mengacu pada sistem penilaian kelompok perlu dipertimbangkan. Seyogyanya penilaian mengacu pada sistem penilaian acuan patokan untuk masing-masing siswa.
- c) Hasil belajar disampaikan sebagai salah satu syarat kelulusan peserta didik dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Hasil belajar peserta didik dijadikan analisis terhadap mutu pendidikan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan pembelajaran.

5) Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Menurut Tim ASB (2011 : 34) untuk menjadi guru yang berkompeten dalam mendidik anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, guru reguler harus mendapatkan pelatihan yang komprehensif. Manfaat pelatihan akan lebih optimal bila peserta yang mengikuti satu rangkaian pelatihan tidak berganti-ganti begitupula dengan penitia pelaksana pelatihan (Tim ASB, 2011 : 35). Dengan tidak berganti-gantinya peserta atau guru yang mengikuti pelatihan pendidikan inklusif bertujuan agar peserta atau guru tersebut dapat memiliki pemahaman yang matang mengenai pendidikan inklusif.. Guru yang telah mengikuti serangkaian pelatihan tersebut diharapkan mampu membagikan ilmu yang didapatnya mengenai pendidikan inklusif kepada rekan kerjanya sesama guru reguler di sekolah. Agar tercapainya pelaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah secara optimal.

Guru Pendidikan Khusus (GPK) adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D – IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa (Dedy Kustawan, 2013 : 124). Menurut Tim ASB (2011 : 41) peran GPK adalah untuk mendampingi guru reguler, bukan untuk menggantikannya mengajar. Dengan kata lain, sumber belajar guru reguler mengenai pendidikan

inklusif tidak hanya melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas, melainkan juga melalui pendampingan GPK di sekolah.

6) Standar Sarana Prasarana

Berdasarkan UU RI No. 26 Tahun 2002 aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk orang yang berkebutuhan khusus dan lansia (orang lanjut usia), guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Menurut Pasal 27 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa kemudahan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Dari pendapat kedua ahli tersebut diketahui bahwa aksesibilitas adalah kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi setiap individu termasuk orang berkebutuhan khusus dan lansia (orang lanjut usia) dalam mengakses sarana prasarana publik.

Sarana Prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus aksesibel bagi semua peserta didik khususnya peserta didik yang memiliki hambatan penglihatan, hambatan fisik, dan fungsi gerak (Dedy Kustawan, 2013 : 137). Sehingga dengan adanya aksesibilitas yang baik, anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak normal lainnya dalam

mengakses fasilitas sekolah guna mengoptimalkan proses pembelajaran di sekolah.

Menurut Tim ASB (2011 : 43) ada 2 (dua) jenis aksesibilitas, yakni aksesibilitas non fisik (sikap) dan fisik.

a) Aksesibilitas non fisik (sikap)

Menurut Dedy Kustawan (2013 : 138) aksesibilitas non fisik adalah suatu akses yang diberikan berkaitan dengan program atau sistem untuk semua orang agar dapat masuk dan keluar dengan mudah berkaitan dengan program atau sistem tersebut. Berdasarkan pendapat di atas, menjelaskan bahwa aksesibilitas non fisik adalah sikap penerimaan ABK di suatu lingkungan, di mana ABK merasa mudah, aman, dan nyaman dalam mengakses lingkungan tersebut. Menurut Tim ASB (2011 : 43) hambatan terbesar bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengakses sekolah reguler adalah sikap negatif, baik sikap guru maupun sikap reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus. Rasa aman anak secara emosi dapat ditingkatkan melalui peningkatan pemahaman staf sekolah baik tenaga pengajar maupun non pengajar, semua siswa, orang tua anak berkebutuhan khusus dan orang tua anak non berkebutuhan khusus, serta masyarakat umum (Tim ASB, 2011 : 45). Hambatan yang muncul dalam aksesibilitas non fisik di sekolah reguler adalah adanya sikap negative atau penolakan dari

lingkungan terhadap ABK. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman warga sekolah terhadap ABK dan pendidikan inklusif. Dengan kata lain, aksesibilitas non fisik adalah bentuk sikap penerimaan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Dengan adanya penerimaan yang baik dari warga sekolah, maka anak berkebutuhan khusus akan merasa nyaman dan tidak merasa dibedakan dengan anak lainnya. Sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal bagi anak berkebutuhan khusus.

b) Aksesibilitas fisik

Menurut Dedy Kustawan (2013 : 138) aksesibilitas fisik adalah kemudahan setiap anak untuk masuk dan ke luar dalam suatu lingkungan, lahan, area, jalan dan ruang atau bangunan. Sedangkan Menurut Joseph dalam Tim ASB (2011 : 45) Aksesibilitas fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan untuk dapat masuk, menggunakan, serta keluar dari satu bangunan. Dari pendapat kedua tokoh di atas, aksesibilitas fisik adalah kemudaham bagi setiap ABK untuk mengakses atau masuk dan keluar dalam suatu lingkungan. Idealnya aksesibilitas fisik bagi anak berkebutuhan didasarkan pada desain universal. Berdasarkan Toolkit LIRP UNESCO (2007) dalam (Tim ASB, 2011 : 45-46) ada 7 prinsip desain universal, antara lain : (1) Dapat digunakan semua orang, (2) Fleksibel dalam

penggunaannya, (3) Mudah digunakan, (4) Informasi penggunaan yang jelas, (5) Toleransi pada kesalahan penggunaan, (6) Tidak memerlukan banyak tenaga fisik dalam penggunaannya, dan (7) Ukuran dan lebar sesuai. Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli, aksesibilitas fisik adalah kemudahan bagi setiap orang dalam mengakses setiap fasilitas yang ada di suatu tempat tanpa bantuan orang lain, dalam hal ini adalah sekolah.

7) Standar Pengelolaan

Dalam pengelolaan sekolah inklusif, menurut Tim ASB (2011 : 55) sekolah inklusif harus terbuka dan menerima semua anak dengan berbagai jenis disabilitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah disarankan agar menyusun target serta kerangka waktu dalam RPS terkait penerimaan semua anak di sekolah.

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan (Dedy Kustawan, 2013 : 56).

Menurut Dedy Kustawan (2013 : 58) perencanaan disusun oleh sekolah bersama komite sekolah, dan stakeholder lainnya dalam bentuk Rencana Kerja Sekolah Jangka Panjang (RKASJP) 8 tahun, Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah (RKASJM) 4 tahun, Rencana Kerja Sekolah Jangka Pendek/Tahunan (RKASJP/T), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Dengan kata lain, RPS adalah dokumen kegiatan sekolah di masa depan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah sekolah tetapkan dalam setiap jangka waktu tertentu, yaitu panjang, menengah, dan pendek.

Tugas dan fungsi sekolah berkenaan dengan pendidikan inklusif harus dibuat programnya secara terintegrasi pada RKS dan RKAS untuk setiap tahunnya (Dedy Kustawan, 2013 : 61). Hasil program tahun sebelumnya menjadi dasar dalam penyusunan program tahun berikutnya (Dedy Kustawan, 2013 : 65).

Penyusunan RPS melibatkan koordinator pendidikan inklusif. Sekolah memiliki seorang koordinator/manajer pendidikan inklusif, yang sudah memasukkan komponen pendidikan inklusif dalam dokumen RPS. Koordinator pendidikan inklusif harus berasal dari guru yang telah mendapatkan pelatihan dari Dinas Pendidikan dan bertanggung jawab melaksanakan diseminasi pelatihan kepada guru-guru lain, baik di dalam maupun di luar sekolahnya dalam satu wilayah (Tim ASB, 2011 : 50). Koordinator pendidikan inklusif bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah sesuai dengan standar pendidikan nasional. Seperti mengkoordinir pelaksanaan asesmen, pengembangan kurikulum, menjalin jejaring dengan berbagai pihak hingga melaporkan perkembangan pelaksanaan pendidikan inklusif kepada kepala sekolah.

Kepala sekolah memiliki kewajiban untuk memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya kepada semua pihak terkait (Dedy Kustawan, 2013 : 157). Selain itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan partisipasi berbagai anggota masyarakat dan pihak ketiga yang mengikat. Melalui kerjasama ini masyarakat dan pihak ketiga atau donatur diharapkan dengan sukarela memberikan perhatian, pengorbanan, dan kerjasama untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan (Dedy Kustawan, 2013 : 154). Dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dapat semakin mendukung keterlaksanaannya pendidikan inklusif di suatu sekolah.

8) Standar Pembiayaan

Menurut Tim ASB (2011 : 54) dikarenakan situasi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berbeda-beda dan beragamnya tingkat keterbukaan pada anak berkebutuhan khusus di masing-masing sekolah maka pemanfaatan dana sekolah harus bersifat fleksibel dengan tetap mempertimbangkan pertanggungjawaban sekolah. Kepala sekolah melakukan penganggaran penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah, mengajukan proposal pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan melakukan pelaporan terkait penggunaan dana subsidi setiap tahunnya (jika ada).

2. Anak Berkebutuhan Khusus

a. Pengertian dan Macam-macam Anak Berkebutuhan Khusus

Lynch (Budiyanto, 2005 : 9) menyatakan bahwa anak berkebutuhan pendidikan khusus adalah semua anak yang mengalami gangguan fisik, mental, atau emosi atau kombinasi dari gangguan-gangguan tersebut sehingga membutuhkan pendidikan khusus dengan guru dan sistem khusus baik secara permanen maupun secara temporal. Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa ABK adalah anak yang memiliki kelainan atau gangguan dalam dirinya, baik secara fisik, mental hingga psikis yang mengakibatkan anak terganggu atau terhambat dalam pembelajarannya. Sehingga ABK membutuhkan pendidikan khusus untuk mengatasi hambatan yang dimilikinya tersebut. Anak Berkebutuhan khusus sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 70 tahun 2009 terdiri dari : (a) Tunanetra, (b) Tunarungu, (c) Tunawicara, (d) Tunagrahita, (e) Tunadaksa, (f) Tunalaras, (g) Lamban belajar, (h) Berkesulitan belajar, (i) Autis, (j) Tunaganda, (k) Anak berbakat istimewa, dan (l) Anak korban/pengidap psikotropika.

1) Tunanetra

Tin Suharmini (2009 : 31) merumuskan tunanetra sebagai suatu kondisi yang ada pada seseorang, yaitu hilangnya daya penglihatan untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga untuk menempuh pendidikan harus menggunakan indera pendengaran,

perabaan, dan penciuman. Sedangkan pengertian anak tunanetra itu sendiri adalah individu yang indera penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas (Sutjihati Soemantri, 2007 : 65). Dari definisi yang dikemukakan beberapa ahli dapat disimpulkan anak tunanetra adalah seorang individu yang kehilangan daya penglihatannya, baik total (*blind*) maupun sebagian (*low vision*). Sehingga membutuhkan bantuan khusus dalam pendidikannya.

2) Tunarungu

Menurut Sutjihati Soemantri (2007 : 94) tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian (*hard of hearing*) maupun seluruhnya (*deaf*) yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Tin Suharmini (2009 : 35) mendefinisikan anak tunarungu sebagai anak yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran, sehingga tidak dapat menangkap dan menerima rangsang suara melalui pendengaran. Jika pendengarannya tidak berfungsi, maka membutuhkan pendidikan khusus. Dari pendapat kedua ahli tersebut diketahui bahwa anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan atau kerusakan pada indera pendengarannya, sehingga kehilangan sebagian maupun seluruh kemampuan pendengarannya.

3) Tunawicara

Hallahan & Kauffman (2009 : 304) menyatakan gangguan komunikasi meliputi kelainan bicara, kelainan bahasa dan variasi dalam komunikasi (meliputi perbedaan komunikasi/dialek dan produksi suara). Dengan kata lain, tunawicara atau gangguan bicara adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif, sedemikian rupa sehingga pemahaman akan bahasa yang diucapkan berkurang.

4) Tunagrahita

IDEA dalam McLeskey, Rosenberg & Westling (2013 : 84) menyatakan

“Intellectual disability means significantly subaverage general intellectual functioning, existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period, that adversely affects a child’s educational performance”.

Sejalan dengan pendapat Sutjihati Soemantri (2007 : 103) yang menyatakan bahwa anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kondisi kecerdasan di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Menurut pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kondisi intelektual di bawah rata-rata dan perilaku adaptif yang rendah.

5) Tunadaksa

Tunadaksa sering diartikan sebagai cacat tubuh atau tunafisik. Menurut Sutjihati Soemantri (2007 : 121) tunadaksa adalah suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat

kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri. Ahmad Toha & Sugiarmun (1996 : 6) membedakan tunadaksa berdasarkan kelainan fungsi dan penyebab yang melatarbelakangi menjadi dua, yaitu yang berhubungan dengan kerusakan sistem persarafan (*cerebral palsy*) dan kerusakan pada alat gerak. Sehingga anak tunadaksa dapat diartikan sebagai gangguan fisik atau cacat tubuh yaitu ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal sehingga menghambat kegiatan individu.

6) Tunalaras

Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga kurang dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya dan hal ini akan mengganggu situasi belajarnya (Sutjihati Soemantri, 2007 : 140). Tin Suharmini (2009 : 49) mendefinisikan anak tunalaras ke dalam empat aspek yang mengarah ke dalam perilaku menyimpang, yaitu kenakalan anak, gangguan emosi, kesukaran menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan pembolosan. Dari penjelasan kedua ahli di atas diketahui bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku yang menghambat dirinya dalam melakukan penyesuaian diri terhadap

lingkungan, di mana ditandai dengan kenakalan anak, gangguan emosi, kemampuan menyesuaikan diri yang rendah dan pembolosan.

7) Lamban Belajar

Anak lamban belajar memiliki ciri-ciri (a) daya tangkap terhadap pelajaran lambat, (b) sering terlambat dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, (c) rata-rata prestasi belajar selalu rendah, dan (d) pernah tidak naik kelas.

8) Berkesulitan Belajar

Berkesulitan belajar atau learning disabilities merupakan istilah generik yang merujuk kepada keragaman kelompok yang mengalami gangguan di mana gangguan tersebut diwujudkan dalam kesulitan-kesulitan yang signifikan yang dapat menimbulkan gangguan proses belajar (Sutjihati Soemantri (2007:196). Sejalan dengan pendapat McLeskey, Rosenberg & Westling (2013 : 54) yang menyatakan

“Specific learning disabilities means a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding or in using language, spoken, or written, which disorder may manifest it self in the imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell, or do mathematical calculations”.

Kesulitan belajar spesifik berarti gangguan dalam satu atau lebih dari dasar proses psikologis yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, berbicara, atau menulis, di mana gangguan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Namun sering dijumpai pula anak dengan prestasi rendah yang

sebetulnya mempunyai potensi tinggi atau sering disebut berprestasi di bawah potensi (*underachiever*).

9) Autis

Strock dalam Hallahan & Kauffman (2009 : 425) menyatakan *autism spectrum disorders are “characterized by varying degrees of impairment in three areas : (a) communication skills, (b) social interactions, and (c) repetitive and stereotyped patterns of behavior”*. Hallahan & Kauffman (2009 : 433) juga menyatakan bahwa *“In addition, they display cognitive deficits, and some have abnormal sensory perceptions”*. Dengan kata lain, anak autis memiliki tiga ciri utama yaitu kemampuan komunikasi, interaksi social, dan perilaku yang berulang. Tidak hanya itu, anak autis mengalami rendahnya tingkat kognitif dan beberapa memiliki gangguan persepsi sensori.

10) Tunaganda

Anak yang memiliki kelainan lebih dari satu macam, dan merupakan kombinasi dari dua atau lebih kelainan berikut : tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, autis, tunawicara-bahasa (UNESCO, 2009 : 84).

11) Anak Berbakat Istimewa

Menurut Tin Suharmini (2009 : 51) mendefinisikan anak berbakat sebagai anak yang diidentifikasi oleh ahli (orang profesional) bahwa ia memiliki kemampuan yang menonjol, dan

prestasi yang tinggi serta membutuhkan pelayanan dan pendidikan khusus yang terdeferensiasi agar dapat merealisasi kemampuannya. Sedangkan Renzulli dalam Sutjihati Soemantri (2007 : 162) keberbakatan terbentuk dari hasil interaksi tiga kluster aspek penting, yaitu : kecakapan di atas rata-rata, komitmen tugas yang tinggi dan kreativitas. Anak berbakat ditandai dengan kemampuan yang menonjol dan prestasi tinggi di mana keberbakatannya didapatkan melalui kecakapan di atas rata-rata, komitmen tugas yang tinggi, dan kreativitas. Sehingga anak berbakat membutuhkan pendidikan khusus untuk mengoptimalkan dan merealisasikan kemampuan yang dimilikinya.

12) Anak Korban/Pengidap Psikotropika

Anak korban/pengidap psikotropika memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (a) muka kelihatan pucat, (b) murung, suka menyendiri, malu, (c) perhatian terhadap pelajaran berkurang, (d) tak mampu konsentrasi dalam waktu yang cukup lama, dan (e) dalam perawatan dirinya terkesan kacau.

b. Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus

Identifikasi anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai upaya awal yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan/gangguan (fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis) dalam pertumbuhan dan

perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya (Kemendiknas dalam Tim ASB, 2011 : 24). Sedangkan menurut Tim MCPM-AIBEP (2009 : 30) Identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah suatu upaya menemukan anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini anak berkelainan dengan berbagai gejala-gejala yang menyertainya.

Jadi, identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah suatu upaya awal untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan/gangguan (fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis) dilihat dari gejala-gejala yang menyertainya. Untuk selanjutnya dilakukan asesmen sesuai dengan gejala yang teridentifikasi.

Asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang peserta didik baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah (Nani Triani, 2012:5).

Roger & George (2013 : 5) mengatakan bahwa *“Assessment is gathering information about a student using a variety of techniques and information sources should shed considerable light on strengths and needs, the nature of a suspected disability and its effect on educational performance, and realistic and appropriate instructional goals and objectives”*.

Menurut Nani Triani (2012 : 7) ada 4 (empat) prinsip asesmen, yakni (1) Menyeluruh, (2) Berkesinambungan, (3) Objektif, dan (4) Mendidik.

1) Menyeluruh

Asesmen dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh domain atau aspek yang menjadi fokus masalah peserta didik.

2) Berkesinambungan

Asesmen dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus menerus untuk memperoleh informasi secara holistik atau menyeluruh tentang peserta didik.

3) Objektif

Asesmen dilakukan secara terencana dan sistematis dengan menggunakan kriteria yang jelas.

4) Mendidik

Proses dan hasil asesmen dapat dijadikan pedoman atau dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu pembelajaran sehingga potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal.

Menurut Roger & George (2013 : 26) ada 2 metode asesmen, yakni *formal and informal methods*.

“Formal tests assume a single set of expectations for all students and come with prescribed criteria for scoring and interpretation. Informal tests are used here to indicate techniques that can easily be incorporated into classroom routines and learning activities”.

Sesuai dengan pendapat Nani Triani (2012 : 11) ada 2 (dua) jenis asesmen, yakni asesmen yang bersifat formal dan informal. Asesmen yang bersifat formal menggunakan instrumen yang telah dibakukan

seperti Snellen Chart untuk mengetahui ketajaman penglihatan, sedangkan asesmen yang bersifat informal dilakukan untuk melihat fungsi dari potensi yang masih ada dan hambatan belajar yang diakibatkan oleh kelainan yang dimilikinya dengan menggunakan instrumen yang dibuat oleh guru, misalnya pedoman observasi.

3. Evaluasi Program

a. Pengertian Evaluasi Program

Menurut Malcolm, Provus (Farida Yusuf, 1989 : 3) mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih. Sedangkan menurut Stufflebeam dan Shinkfield dalam Eko Putro Widoyoko (2011:3) menyatakan bahwa: Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan standar yang ada.

Menurut Brinkerhoff dalam Eko Putro Widoyoko (2011:4) menemukan bahwa : Evaluasi merupakan proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Dalam pelaksanaan

evaluasi ada tujuh elemen yang harus dilakukan, yaitu 1) penentuan fokus yang akan dievaluasi (*focusing the evaluation*), 2) penyusunan desain evaluasi (*designing the evaluation*), 3) pengumpulan informasi (*collecting information*), 4) analisis dan interpretasi informasi (*analyzing and interpreting*), 5) pembuatan laporan (*reporting information*), 6) pengelolaan evaluasi (*managing evaluation*), dan 7) evaluasi untuk evaluasi (*evaluating evaluation*).

Menurut Ralph Tyler dalam Suharsimi Arikunto (2009:3) menyatakan bahwa : Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Sedangkan program menurut Eko Putro Widoyoko diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan saksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang (2009 : 8). Program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. (Farida Yusuf Tayibnapsis, 2000 : 9). Jadi, program adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan tujuan mendatangkan hasil atau pengaruh tertentu.

Sehingga evaluasi program dapat didefinisikan sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi untuk

dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya.

b. Tujuan Evaluasi Program

Menurut Suharsimi & Cepi (2014 : 18) tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya. Evaluasi memberikan manfaat baik bagi siswa, guru maupun lembaga pendidikan. Dengan adanya evaluasi, siswa dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah digapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi dimana siswa mendapatkan nilai yang memuaskan maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus, motivator agar siswa dapat lebih meningkatkan prestasi. Pada kondisi dimana hasil yang dicapai tidak memuaskan maka siswa akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar, namun demikian sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru agar siswa tidak putus asa. Dari sisi guru, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik dan tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Untuk lembaga pendidikan, hasil evaluasi dapat digunakan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

c. Model-model Evaluasi Program

Beberapa model evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan program yang dilakukan sehingga diperoleh langkah-langkah untuk melakukan perbaikan ataupun pengembangan. Model evaluasi merupakan desain evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi, yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap evaluasinya. Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli dalam mengevaluasi program pembelajaran, yaitu sebagai berikut :

1) *Evaluasi Model Stake (Countenance Model)*

Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgement dan membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan, yaitu antecedent (context), transaction (process), dan outcomes (Suharsimi & Cepi, 2014 : 43). Stake mengatakan bahwa apabila kita menilai suatu program pendidikan, kita melakukan perbandingan yang relatif antara program dengan yang lain, atau perbandingan yang absolut yaitu membandingkan suatu program dengan standar tertentu (Eko Putro Widoyoko, 2009 : 187).

2) *Evaluasi Model CIPP (Context, Input, Process, and Product)*

Model evaluasi CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan merupakan singkatan dari *Context, Input, Process* dan *Product*. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari

proses sebuah program kegiatan (Suharsimi & Cepi, 2014 : 45). Menurut Endang Mulyatiningsih (2012 : 121) model CIPP dilakukan untuk mengevaluasi apakah program telah dilaksanakan dengan langkah-langkah yang benar dan dilakukan secara komprehensif untuk memahami aktivitas-aktivitas program mulai dari munculnya ide program sampai pada hasil yang dicapai setelah program dilaksanakan.

Sesuai dengan namanya, ada empat macam fokus evaluasi dengan model CIPP, yaitu.

a) Evaluasi Konteks

Menghasilkan informasi tentang macam-macam kebutuhan yang telah diatur prioritasnya, agar tujuan dapat diprioritaskan. Sehingga menghasilkan keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus.

b) Evaluasi Input

Menyediakan informasi tentang masukan yang terpilih, butir-butir kekuatan dan kelemahan, strategi dan desain untuk merealisasikan tujuan.

c) Evaluasi Proses

Menyediakan informasi untuk para evaluator melakukan prosedur monitoring terpilih yang mungkin baru diimplementasi sehingga butir yang kuat dapat dimanfaatkan dan yang lemah dapat dihilangkan. Di mana pada keputusan ini para evaluator

mengusahakan sarana prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau eksekusi, rencana, metode, dan strategi yang hendak dipilih.

d) Evaluasi Produk

Mengakomodasi informasi untuk meyakinkan dalam kondisi apa tujuan dapat dicapai, dan juga untuk menentukan jika strategi yang berkaitan dengan prosedur dan metode yang diterapkan guna mencapai tujuan sebaiknya berhenti.

3) *Evaluasi Model Dyscrepancy*

Kata *discrepancy* adalah istilah bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kesenjangan”. Model yang dikembangkan oleh Malcom Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program (Suharsimi & Cepi, 2014 : 48).

Menurut Fernandes (1984 : 10) *Dyscrepancy model* terdiri dari lima tahap, yaitu : 1) *Design*, 2) *Installation*, 3) *Process*, 4) *Product*, dan 5) *comparision*. Langkah pertama yaitu *design*, *design* adalah mengorganisir gambaran tujuan, proses, ata aktivitas dan kemudian menggambarkan sumber daya yang diperlukan. Kedua *installation*, desain/definisi program menjadi standar baku untuk diperbandingkan dengan penilaian operasi awal program. Gagasannya adalah untuk menentukan sama dan sebangun, sudah atau tidaknya program telah diterapkan sebagaimana desainnya.

Ketiga proses, pada tahap ketiga adalah pengumpulan data untuk menjaga keterlaksanaan program, tujuannya untuk memperhatikan kemajuan kemudian menentukan dampak awal, pengaruh, atau efek dari program tersebut. Keempat *product*, dalam tahap ini melihat tingkat pencapaian suatu program dengan harapan untuk *follow up* jangka panjang pemahaman atas dampak. Kelima adalah *comparation*, untuk membandingkan hasil yang dicapai. Jika terdapat kesenjangan maka selanjutnya memberikan rekomendasi untuk direvisi berdasarkan temuan tersebut.

4) *Evaluasi Model CSE-UCLA*

CSE-UCLA merupakan singkatan dari *Center for the Study of Evaluation – University of California in Los Angeles*. Ciri dari model ini adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Fernandes dalam Suharsimi & Cepi (2014 : 44) memberikan penjelasan tentang model CSE-UCLA menjadi empat tahap, yaitu (a) *needs assessment*, dalam tahap ini evaluator memusatkan pada penentuan masalah; (b) *program planning*, pada tahap ini evaluator melakukan pengumpulan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap pertama; (c) *formative evaluation*, evaluator memusatkan pada keterlaksanaan; dan (d) *summative*

evaluation, evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program.

Model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak bervariasi namun kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu sehubungan dengan pengambilan keputusan. Pemilihan model evaluasi yang akan digunakan tergantung pada tujuan evaluasi dalam mengevaluasi program pendidikan digunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan mencakup seluruh proses pendidikan yang dilaksanakan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Provus yang dikenal dengan Discrepancy model. Untuk melihat kesenjangan yang terjadi tentang keterlaksanaan program yang sebenarnya dengan keadaan di lapangan.

B. Penelitian yang Relevan

Untuk melengkapi kajian teori yang telah diuraikan, berikut diuraikan beberapa hasil penelitian yang relevan, yakni Maria Purnama Nduru (2012) yang berjudul *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Kabupaten Sleman*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dari aspek konteks, input, proses, dan produk. Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi yang dilakukan dengan pendekatan

kuantitatif dan didukung dengan pendekatan kualitatif. Sehingga mendapatkan hasil evaluasi yang mendalam dan komprehensif serta menyeluruh tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kriteria penilaian yang digunakan berdasarkan panduan standar pelayanan minimum. Hasil penelitian menunjukkan aspek konteks memenuhi kategori baik, aspek input memenuhi kategori cukup, aspek proses memenuhi kategori cukup dan aspek produk memenuhi kategori baik.

Redi Susanto (2012) yang berjudul Efektifitas Program Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SDN Giwangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SDN Giwangan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif dilihat dari tenaga pendidik, sarana prasarana, monitoring dan evaluasi sudah efektif. Hanya saja penyelenggaraan pendidikan inklusif dilihat dari kurikulum belum efektif.

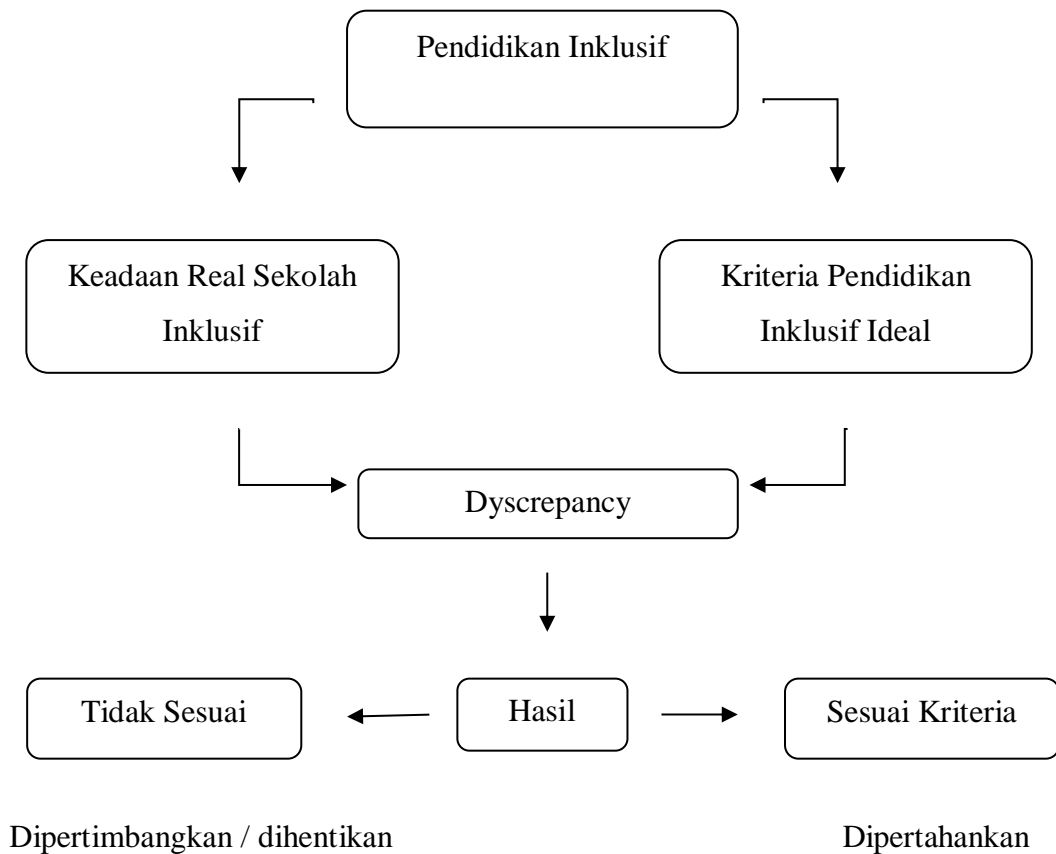
C. Alur Pikir

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian evaluasi yang disusun guna mengetahui penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Bangunrejo 2. Dalam amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga ditekankan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis

dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan memajemukan bangsa. Setiap warga negara dijamin dan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ini berarti bahwa tidak ada pengecualian bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial.

Tidak adanya pengecualian untuk mendapatkan pendidikan yang sama dan bermutu ini merupakan salah satu hal yang melandasi lahirnya kebijakan pendidikan inklusif. Kebijakan inilah yang memicu munculnya berbagai lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif di dalamnya, seperti sekolah inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif idealnya diselenggarakan dengan mengacu pada kriteria ideal penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah disusun oleh Pemerintah. Kriteria ideal penyelenggaraan yang dimaksud adalah 8 Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di lembaga-lembaga pendidikan seyogyanya dievaluasi guna mendapatkan gambaran apakah penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah inklusif sudah sesuai atau belum dengan kriteria ideal pendidikan inklusif yang ada.

Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi discrepancy. Model ini digunakan untuk melihat kesenjangan yang terjadi tentang keterlaksanaan program yang sebenarnya dengan keadaan di lapangan.



Gambar 1. Bagan Alur Pikir

Penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam apakah terdapat kesenjangan dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 dengan kriteria standar ideal penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah idealnya diarahkan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran, terlebih bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil dari evaluasi akan dijadikan rekomendasi bagi Pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Jika implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri

Bangunrejo 2 sesuai dengan standar kriteria ideal maka dipertahankan, dan jika tidak sesuai dengan kriteria ideal maka program penyelenggaraan pendidikan inklusif dipertimbangkan/dihentikan.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?
 - a. Bagaimana pelaksanaan standar isi pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?
 - b. Bagaimana pelaksanaan standar proses pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?
 - c. Bagaimana pelaksanaan standar kompetensi lulusan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?
 - d. Bagaimana pelaksanaan standar penilaian pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?
 - e. Bagaimana standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?
 - f. Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?
 - g. Bagaimana pelaksanaan standar pengelolaan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?
 - h. Bagaimana pelaksanaan standar pembiayaan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?

2. Apa faktor penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi *discrepancy* yang dikembangkan oleh *Provus*. Model yang dikembangkan oleh Malcom Provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program (Suharsimi & Cepi, 2014 : 48). Alasan peneliti menggunakan model evaluasi *discrepancy* adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara jelas dan rinci tentang implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, faktor penghambat penyelenggaraan, dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2.

Model ini merupakan suatu prosedur *problem-solving* untuk mengidentifikasi kelemahan dan untuk mengambil tindakan korektif. Dengan model ini, proses evaluasi pada langkah-langkah dan isi kategori sebagai cara memfasilitasi perbandingan capaian program dengan standar untuk digunakan sebagai kebijakan di masa depan. Argumentasi *Provus*, bahwa semua program memiliki daur hidup (*life cycle*). Karena program terdiri atas

langkah-langkah pengembangan, aktivitas evaluasi banyak diartikan adanya integrasi pada masing-masing komponennya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di SD Negeri Bangunrejo 2 yang merupakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sejak tahun 2012 SD Negeri Bangunrejo 2 ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Adapun alasan kenapa SD Negeri Bangunrejo 2 yang dipilih sebagai tempat penelitian, karena lokasi sekolah yang mudah dijangkau dan SD Negeri Bangunrejo 2 yang sudah 4 tahun menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, namun belum pernah dilakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2016.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sumber tempat diperolehnya data dan keterangan penelitian. Yang dimaksud dengan subjek menurut Spradley (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008 : 188) adalah sumber informasi. Maka subjek yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berada di SD Negeri Bangunrejo 2 yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan guru pembimbing khusus (GPK).

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini pelaksanaan standar pelayanan minimum pendidikan inklusif. Bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta.

E. Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini disusun dan ditetapkan sebelum pelaksanaan kegiatan evaluasi. Penyusunan kriteria dilakukan dengan mempertimbangkan kajian teori, karakteristik program yang dievaluasi dan standar pelayanan minimal pendidikan nasional menurut Tim ASB (2011 : 70-79).

Setiap komponen yang dievaluasi dinyatakan layak dan baik apabila telah mencakup kawasan indikator-indikator yang disusun dalam komponen evaluasi tersebut. Kriteria evaluasi setiap komponen secara ringkas disusun dalam indikator-indikator sebagai berikut :

1. Standar Isi

Indikator 1: Setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan kurikulum yang telah dikembangkan dengan model adaptasi dan/atau modifikasi maupun model program pembelajaran individual yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus.

2. Standar Proses

Indikator 2: Setiap anak berkebutuhan khusus yang akan menerima pembelajaran telah diidentifikasi dan diasesmen secara sistematis setiap tahun.

Indikator 3: Guru melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan RPI yang disusun.

Indikator 4: Guru mengubah setting kelas lebih dari satu jenis setting kelas setiap satu minggu sekali

Indikator 5: Guru menyediakan materi belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajar setiap anak berkebutuhan khusus untuk masing-masing subjek pengajaran.

Indikator 6: Guru menerapkan strategi dan praktik mengajar yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus.

Indikator 7: Guru menerapkan kecakapan berkomunikasi yang sesuai dengan karakteristik setiap anak berkebutuhan khusus.

Indikator 8: Setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendampingan baik oleh guru, GPK dan teman sebaya.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Indikator 9: Setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan program pengembangan bakat dan program kompensatoris sesuai dengan potensi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus,

Indikator 10: Setiap ABK lulus UN/USEK setiap tahunnya.

Indikator 11: Setiap anak berkebutuhan khusus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4. Standar Penilaian

Indikator 12: Penentuan SKL dan KKM yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap anak berkebutuhan khusus

Indikator 13: Setiap anak berkebutuhan khusus mengikuti UN dan USEK sesuai dengan kebutuhan kemampuan anak berkebutuhan khusus.

Indikator 14: Setiap anak berkebutuhan khusus yang dinyatakan lulus USEK mendapatkan STTB.

Indikator 15: Setiap satu bulan sekali sekolah melaporkan hasil pembelajaran anak berkebutuhan khusus secara rutin kepada orangtua, yang tidak hanya berupa angka/skor namun disertai dengan beberapa komentar naratif.

Indikator 16: Semua pihak (Guru, GPK dan orangtua) selalu terlibat dalam proses penyesuaian/pengembangan penilaian hasil belajar anak.

5. Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Indikator 17: Perwakilan guru dari sekolah telah mengikuti semua pelatihan tentang pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus.

Indikator 18: Guru reguler yang telah menerima pelatihan telah melakukan sosialisasi pendidikan inklusif kepada rekan sejawat, masyarakat, dan sekolah lain.

Indikator 19: GPK yang membantu program pendidikan inklusif memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1) pendidikan luar biasa (ortopedagog) dan telah berpengalaman di bidangnya dalam memahami ABK. GPK datang ke sekolah lebih dari dua kali dalam seminggu dan memberikan dampingan konsultatif kepada guru reguler. Serta setiap ABK mendapatkan pendampingan pembelajaran yang optimal.

6. Standar Sarana Prasarana

Indikator 20: Sarana dan prasarana belajar tersedia sesuai dengan seluruh jenis disabilitas ABK.

7. Standar Pengelolaan

Indikator 21: Sekolah terbuka untuk menerima semua jenis disabilitas anak berkebutuhan khusus.

Indikator 22: Sekolah telah memasukkan komponen pendidikan inklusi ke dalam dokumen Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan telah terlaksana

Indikator 23: Sekolah memiliki koordinator/manajer pendidikan inklusif yang aktif.

Indikator 24: Sekolah melaksanakan kebijakan (meminimalisir pengulangan kelas) bagi anak berkebutuhan khusus dengan tidak mengenai pengulangan kelas bagi ABK.

Indikator 25: Terdapat orangtua ABK yang berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah.

Indikator 26: Kepala sekolah melaporkan secara rutin data anak berkebutuhan khusus kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Indikator 27: Sekolah telah berjejaring dengan stakeholder lain dalam mendukung pendidikan inklusif di sekolah dengan terikat oleh MoU yang telah ditandatangani.

Indikator 28: Terdapat dukungan dari pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Serta sekolah telah bekerjasama dengan sekolah jenjang di atasnya guna kelanjutan pendidikan ABK.

8. Standar Pembiayaan

Indikator 29: Setiap tahun sekolah memasukkan komponen pendidikan inklusif ke dalam dokumen RAPBS/RAKS.

Indikator 30: Sekolah menerima dan melaporkan penggunaan dana subsidi secara sistematis.

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan: 1) Kuesioner, 2) Wawancara, 3) Observasi, dan 4) Dokumentasi.

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013 : 199). Kuesioner menjadi teknik pengumpulan data yang utama dengan sumber informasinya adalah kepala sekolah, guru wali kelas 1-6 dan guru pembimbing khusus (GPK) di SD Negeri Bangunrejo 2.

2. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013 : 203) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dilaksanakan untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru wali kelas dan GPK, serta untuk mengetahui ketersediaan sarana prasarana yang menunjang aksesibilitas ABK. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran di dalam kelas ketika guru sedang mengajar dan mengamati secara langsung ketersediaan dan penggunaan sarana prasarana yang menunjang aksesibilitas ABK.

3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2013 : 194). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2.

4. Dokumentasi

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 158), metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mendukung dalam penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk meneliti benda-benda tertulis, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang dimiliki SD Negeri Bangunrejo 2 meliputi dokumen sekolah mengenai sejarah berdirinya sekolah, RPS, RAPBS/RAKS, prestasi belajar ABK, STTB dan data-data lain yang mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimum sekolah inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2.

Secara singkat, sumber informasi, teknik dan alat pengumpul data pada setiap komponen yang dievaluasi dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Materi, Indikator, Sumber Informasi dan Teknik Pengumpulan Data

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Nomor	Sumber Informasi	Teknik Pengumpulan Data
1.	Standar Isi				
	a.	Pengembangan Kurikulum	1	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner, Observasi
	b.	RPI	1	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner, Observasi
2.	Standar Proses				
	a.	Pelaksanaan Asesmen Awal	2	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner, Wawancara, Dokumentasi
	b.	Pelaksanaan Kurikulum dan RPI	3	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner, Observasi
	c.	Setting Kelas	4	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas, Observasi	Kuesioner, Observasi, Wawancara
	d.	Materi Belajar	5	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas, Observasi	Kuesioner, Observasi
	e.	Strategi Mengajar	6	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas, Observasi	Kuesioner, Observasi
	f.	Kecakapan berkomunikasi dengan ABK	7	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas, Observasi	Kuesioner, Observasi
	g.	Pendampingan Teman Sebaya	8	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas, Observasi	Kuesioner, Observasi, Wawancara
3.	Standar Kompetensi Lulusan				
	a.	Program Pengembangan	9	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner, Observasi, Wawancara

		Bakat			
	b.	Program Kompensatoris	9	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner, Observasi, Wawancara
	c.	Kelulusan (UN)	10 dan 11	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner, Dokumentasi
4.	Standar Penilaian				
	a.	Penentuan KKM dan SKL	12	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner
	b.	Pelaksanaan UN dan USEK Bagi ABK	13	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner
	c.	STTB	14	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner, Dokumentasi
	d.	Laporan Perkembangan Hasil Belajar ABK ke Orangtua	15	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner, Dokumentasi
	e.	Pihak yang Terkait Dalam Proses Menilai	16	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner, Wawancara
5.	Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan				
	a.	Pelatihan Guru oleh Dinas	17 dan 18	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner, Wawancara, Dokumentasi
	b.	Kompetensi GPK	19	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner
6.	Standar Sarana Prasarana				
	a.	Sarana Prasarana	20	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner, Observasi, Wawancara

7.	Standar Pengelolaan				
	a.	Sekolah Terbuka Terhadap ABK	21	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner
	b.	RPS	22	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner
	c.	Koordinator Inklusi	23	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner
	d.	Kebijakan Sekolah (Pengulangan Kelas)	24	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner
	e.	Peran Orangtua	25	Kepala Sekolah, GPK dan Guru Wali Kelas	Kuesioner
	f.	Laporan Rutin Kepala Sekolah	26	Kepala Sekolah	Kuesioner
	g.	Jaringan Sekolah ke Stakeholder	27	Kepala Sekolah	Kuesioner, Wawancara
	h.	Jaringan Sekolah ke Sekolah Jenjang Selanjutnya	27	Kepala Sekolah	Kuesioner, Wawancara
	i.	Dukungan Pemerintah	28	Kepala Sekolah	Kuesioner
8.	Standar Pembiayaan				
	a.	RAPBS	29	Kepala Sekolah	Kuesioner, Wawancara
	b.	Dana Tambahan	30	Kepala Sekolah	Kuesioner, Wawancara
	c.	Lapor Dana	30	Kepala Sekolah	Kuesioner

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi.

1. Kuesioner

Kuesioner disusun untuk mendapatkan data secara menyeluruh terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2. Instrumen kuesioner terdiri dari 42 butir pertanyaan.

Kisi-kisi instrumen kuesioner dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Kuesioner

No .	Komponen	Sub Komponen	Indikator Nomor	No Butir	Jumlah
1.	Standar Isi				
		Pengembangan Kurikulum dan RPI	1	3 dan 4	2
2.	Standar Proses				
		Pelaksanaan Asesmen Awal	2	2	1
		Pelaksanaan Kurikulum dan RPI	3	5	1
		Setting Kelas	4	6	1
		Materi Belajar	5	7	1
		Strategi Mengajar	6	8	1
		Cara Berkomunikasi dengan ABK	7	9	1
		Pendampingan Teman Sebaya	8	14	1
3.	Standar Kompetensi Lulusan				
		Program Pengembangan Bakat dan Program Kompensatoris	9	16 dan 17	2
		Kelulusan (UN)	10 dan	18	2

			11	dan 22	
4.	Standar Penilaian				
		Penentuan KKM & SKL	12	15 dan 19	2
		Pelaksanaan UN dan USEK Bagi ABK	13	20 dan 21	2
		STTB dan Laporan Perkembangan Hasil Belajar ABK ke Orangtua	14 dan 15	23 dan 24	2
		Pihak yang Terkait Dalam Proses Menilai	16	25	1
5.	Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan				
		Pelatihan Guru oleh Dinas	17 dan 18	26 dan 27	2
		Kompetensi GPK	19	10, 11, 12 dan 13	4
6.	Standar Sarana Prasarana				
		Sarana Prasarana	20	28	1
7.	Standar Pengelolaan				
		Sekolah Terbuka Terhadap ABK	21	29	1
		RPS	22	30	1
		Koordinator Inklusi	23	31	1
		Kebijakan Sekolah (Pengulangan Kelas)	24	32	1
		Peran Orangtua	25	33	1
		Laporan Rutin	26	34	1

		Kepala Sekolah			
		Jaringan Sekolah	27	35 dan 36	2
		Dukungan Pemerintah	28	1, 38 dan 39	3
8.	Standar Pembiayaan				
		RAPBS	29	37	1
		Dana Tambahan	30	40 dan 41	2
		Lapor Dana	30	42	1

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi dibuat untuk mengumpulkan data mengenai proses pembelajaran di kelas dan ketersediaan sarana prasarana.

Kisi-kisi pedoman observasi terdiri dari 10 butir pertanyaan. Kisi-kisi pedoman observasi dapat dilihat secara ringkas dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kisi-kisi Pedoman Observasi

No	Aspek yang diamati	Indikator Nomor	Jumlah Butir
1.	Pengembangan kurikulum dan RPI	1	1
2.	Setting kelas	4	1
3.	Materi belajar ABK	5	1
4.	Strategi mengajar kepada ABK	6	1
5.	Kecakapan berkomunikasi dengan ABK	7	1
6.	Pendampingan pembelajaran ABK	8	1
7.	Pendampingan teman sebaya	8	1
8.	Bimbingan pemahaman materi	9	1
9.	Ketersediaan sarana prasarana	20	1

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara disusun untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2. Informasi tambahan yang dikumpulkan mengenai proses pembelajaran, pelaksanaan asesmen, keadaan sarana prasarana, jejaring stakeholder dan kendala-kendala yang dihadapi para tenaga kependidikan dalam melaksanakan pendidikan inklusif.

4. Dokumentasi

Untuk mendukung hasil pengumpulan data yang diperoleh dari kuesioner, observasi, dan wawancara berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang ada dikumpulkan, dideskripsikan untuk

menggambarkan komponen anak berkebutuhan khusus dan komponen prestasi akademik anak berkebutuhan khusus.

Instrumen penelitian secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran.

Rubrik skoring untuk instrumen kuesioner dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut.

1. Rubrik Skoring Instrumen kuesioner dapat digambarkan dalam tabel 5.

Tabel 5. Rubrik Skoring Instrumen Kuesioner

Aspek	Skoring			
	1	2	3	4
Standar isi				
Pengembangan Kurikulum dan RPI	0%	1-30% ABK	31-70% ABK	71-100% ABK
Standar Proses				
Pelaksanaan Asesmen Awal	Belum	Ya, pernah sekali	Ya, tetapi tidak setiap tahun	Ya, secara sistematis setiap tahun
Pelaksanaan Kurikulum dan RPI	Belum	Kadang-kadang	Hampir selalu	Selalu
Setting Kelas	Tidak pernah	Satu sampai dua kali setahun	Satu kali sampai dua kali dalam sebulan	Setidaknya setiap minggu
Materi Belajar	Hanya buku bacaan (sama dengan anak-anak lain)	Guru terkadang membawa materi pembelajaran tambahan ke dalam kelas	Guru secara rutin membawa materi pembelajaran tambahan ke dalam kelas	Guru menyiapkan berbagai materi pembelajaran tambahan

				untuk masing-masing subjek pengajaran
Strategi Mengajar	Belum	Ya, untuk satu jenis disabilitas	Ya, untuk beberapa jenis disabilitas	Ya, untuk semua jenis disabilitas
Cara Berkomunikasi dengan ABK	Belum	Ya, untuk satu jenis disabilitas	Ya, untuk beberapa jenis disabilitas	Ya, untuk semua jenis disabilitas
Pendampingan Teman Sebaya	0%	Ya, untuk 1-30% ABK	Ya, untuk 31-70% ABK	Ya, untuk 71-100% ABK
Standar Kompetensi Lulusan				
Program Pengembangan Bakat dan Program Kompensatoris	0% / Belum	Ya, untuk 1-30% ABK / Ya, hanya untuk 1 jenis disabilitas	Ya, untuk 31-70% ABK / Ya, hanya untuk beberapa jenis disabilitas	Ya, untuk 71-100% ABK / Ya, untuk semua jenis disabilitas
Kelulusan (UN)	0%	1-30% ABK	31-70% ABK	71-100% ABK
Standar Penilaian				
Penentuan KKM	0%	1-30% ABK	31-70% ABK	71-100% ABK
Pelaksanaan UN dan USEK Bagi ABK	0%	1-30% ABK	31-70% ABK	71-100% ABK
STTB dan	0% /	1-30% ABK /	31-70%	71-100%

Laporan Perkembangan Hasil Belajar ABK ke Orangtua	Belum ada komunikasi dengan orangtua	Saat pembagian rapor (dua kali setahun)	ABK / Kadang-kadang bila ada masalah	ABK / Sebulan sekali
Pihak yang Terkait Dalam Proses Menilai	Tidak terdapat penyesuaian untuk penilaian hasil belajar anak	Kadang-kadang	Hampir selalu	Selalu
Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan				
Pelatihan Guru oleh Dinas	Belum ikut pelatihan / Belum	Ikut 1-5 topik / Sudah, untuk sebagian guru sekolah	Ikut 6-10 topik / Sudah, untuk semua guru sekolah	Semua topik / Sudah, untuk guru di sekolah dan sekolah lain
Kompetensi GPK	< S1/ Tidak ada GPK/Tidak ada dampingan	S1 Non Kependidikan/1 kali dalam seminggu/ Mendampingi anak berkebutuhan khusus secara langsung (satu per satu)	S1 Kependidikan/2 kali dalam seminggu/ Mendampingi guru	S1 PLB/Lebih dari 2 kali dalam seminggu / Dampingan konsultatif
Standar Sarana Prasarana				
Sarana Prasarana	Belum ada	Hanya untuk satu jenis disabilitas	Untuk beberapa jenis disabilitas	Untuk semua jenis disabilitas
Standar Pengelolaan				
Sekolah Terbuka	Belum	Terbuka hanya pada	Terbuka hanya pada	Terbuka pada

Terhadap ABK		satu jenis disabilitas	beberapa jenis disabilitas tertentu	semua jenis disabilitas
RPS	Belum	Dalam perencanaan	Sudah ada secara tertulis namun belum terlaksana	Telah terlaksana
Koordinator Inklusi	Belum	Sedang direncanakan	Ada	Ada dan aktif
Kebijakan Sekolah (Pengulangan Kelas)	Disamakan dengan anak-anak lain	Terdapat kebijakan kelas percobaan	Setidaknya dalam 3 tahun anak tidak dikenai pengulangan kelas	Anak berkebutuhan khusus tidak dikenai pengulangan kelas
Peran Orangtua	Belum	Sedang dalam pembahasan	Ada	Ada dan aktif
Laporan Rutin Kepala Sekolah	Belum	Kadang-kadang	Hampir selalu	Secara rutin
Jaringan Sekolah	Belum	Kadang-kadang / Tergantung permintaan	Secara rutin / Tercantum dalam rencana kegiatan sekolah	Terdapat MoU yang telah ditandatangani / Ya, selalu terlaksana
Dukungan Pemerintah	Belum/ Belum	Baru akan diajukan/ Kadang-kadang	Sedang dalam proses /Hampir selalu	Ya, sudah ada / Secara rutin
Standar Pembiayaan				
RAPBS	Belum	Sedang dalam	Tidak setiap tahun	Ya, setiap

		pembicaraan		tahunnya
Dana Tambahan	Belum	Sedang diajukan	Ya, namun tidak secara rutin	Ya, secara rutin
Lapor Dana	Belum	Kadang-kadang	Satu tahun Sekali	Sudah sistematis

G. Validitas Instrumen

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013 : 173). Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi dan validitas konstruk. Instrumen yang disusun diadaptasi dari panduan standar pelayanan minimum penyelenggaraan pendidikan inklusif Provinsi DIY yang disesuaikan dengan model evaluasi *Discrepancy* yang digunakan.

Pengujian validitas isi untuk memastikan apakah isi instrumen dapat mengukur secara tepat apa yang ingin diukur, kemudian diuji validitas konstruk melalui pertimbangan dari para ahli (*expert judgement*) yang berkaitan dengan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Instrumen telah dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Skripsi, yaitu Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd dengan melihat kisi-kisi dari instrument yang telah disusun.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah semua data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Jenis data atau informasi yang diperoleh selama wawancara, observasi dan dokumentasi dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh dengan membandingkan Kriteria pendidikan inklusif ideal dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta.

Data dari hasil kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan penskoran atau penilaian. Menurut Riduwan (2011 : 89) hasil penskoran dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif presentase. Tujuan penggunaan metode analisis deskriptif presentase adalah untuk memberikan gambaran ketercapaian pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2. Rumus deskriptif presentase (kuantitatif) adalah sebagai berikut :

$$DP = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

DP = Deskriptif Presentase

n = Skor empiric (skor yang diperoleh)

N = Skor ideal

Tabel 6. Kriteria Pencapaian

No.	Rentang	Keterangan
1.	76 - 100 %	Sangat Baik
2.	51 - 75 %	Baik
3.	26 - 50 %	Cukup Baik
4.	0 - 25 %	Kurang Baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta merupakan salah satu Sekolah Dasar yang berada di RW 13 Bangunrejo, Kricak, Tegalrjo, Yogyakarta. Berdirinya SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta pada tahun 1980 dengan status sekolah negeri dan tanah milik pemerintah. Luas tanah yakni 1.183 m^2 dan luas bangunan 481 m^2 dengan status tanah milik sendiri. Nomor Induk Sekolah yakni 100130 dan NSS yakni 101046005018.

SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memiliki visi terbentuknya siswa cerdas, terampil dan berbudi pekerti. Misi SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta adalah menciptakan suasana belajar secara disiplin dan melatih keterampilan secara kontinyu serta membina agar menjadi siswa yang berakhlak dan bertakwa

Jumlah keseluruhan tenaga pendidik adalah 15 orang pendidik yang berkualifikasi pendidikan S2 berjumlah 1 orang atau sebesar 7 %, S1 berjumlah 11 orang atau sebesar 73 %, D2 berjumlah 2 orang atau sebesar 13 %, dan SPG berjumlah 1 orang atau sebesar 7 %. Deskripsi lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel 7.

Tabel 7. Deskripsi Tenaga Kependidikan SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jumlah	%
1.	RS	Kepala Sekolah	S2	1	7 %
2.	SO	Guru Kelas VI	S1	11	73 %
3.	SI	Guru Kelas V	S1		
4.	MU	Guru Kelas I	S1		
5.	PW	Guru Kelas III	S1		
6.	HA	Guru Kelas IV	S1		
7.	TC	Guru SBDP	S1		
8.	IR	Guru Penjasorkes	S1		
9.	OS	GPK	S1		
10.	AL	GPK	S1		
11.	NM	GPK	S1		
12.	US	Guru TI	S1		
13.	CJ	Guru Kelas II	D2	2	13 %
14.	SA	Guru PAI	D2		
15.	SU	Guru PAK	SPG	1	7 %
Jumlah				15	100 %

Pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah, berawal dari kesadaran akan kondisi siswa yang kebanyakan mengalami masalah dalam belajar, emosi dan perilaku. Siswa yang diterima bukan hanya siswa normal pada umumnya, melainkan siswa yang mengalami permasalahan belajar seperti kesulitan belajar, lambat belajar, permasalahan emosi dan perilaku, serta hambatan fisik. Pelaksanaan sekolah inklusif memerlukan dukungan dan kerjasama antara pemerintah, guru, orangtua, dan masyarakat. Pada tahun ajaran 2015/2016 siswa/siswi di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta berjumlah 108 siswa, yang sebagian siswanya adalah anak berkebutuhan khusus dengan jumlah 61 siswa. Berdasarkan

jenis kekhususannya, anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta dikelompokkan dalam 5 jenis kekhususan yang dapat dilihat dalam tabel 8.

Tabel 8. Jenis dan Jumlah ABK di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta

No.	Jenis ABK	Jumlah
1.	Tunadaksa	2
2.	Tunagrahita	25
3.	Autis	1
4.	Lamban Belajar	29
5.	Kesulitan Belajar	2
Jumlah		61

Sarana dan prasarana untuk pembelajaran di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta cukup memadai, sarana dan prasarana tersebut di antaranya yaitu ruang perpustakaan, ruang UKS, gudang, mushola, ruang sumber, sarana olahraga, dan ruang komputer. Selain itu kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2. Deskripsi Data

a. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta

Hasil penelitian diperoleh dengan cara menganalisis data, yaitu dengan mengolah data dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak, evaluasi standar

pelayanan minimum pendidikan inklusi dilakukan melalui beberapa tahap sesuai dengan evaluasi model kesenjangan. Tahapan-tahapannya yaitu :

- 1) Mengembangkan suatu desain dan standar-standar yang menspesifikasi karakteristik implementasi. Kriteria standar nasional penyelenggaraan pendidikan inklusif yang digunakan disusun dengan mempertimbangkan kajian teori, karakteristik program yang dievaluasi, dan standar pelayanan minimum pendidikan nasional yang terdiri dari 30 indikator.
- 2) Model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi model kesenjangan (*dyscrepancy*). Implementasi penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta dibandingkan dengan kriteria delapan Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif.
- 3) Menjaring kinerja objek evaluasi meliputi pelaksanaan dan hasil penelitian. Penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dilihat dari 8 Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
- 4) Mengidentifikasi ketimpangan-ketimpangan atau kesenjangan-kesenjangan antara kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah

Inklusif dengan hasil pelaksanaan program pendidikan inklusif oleh SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta kemudian menentukan rasio kesenjangannya.

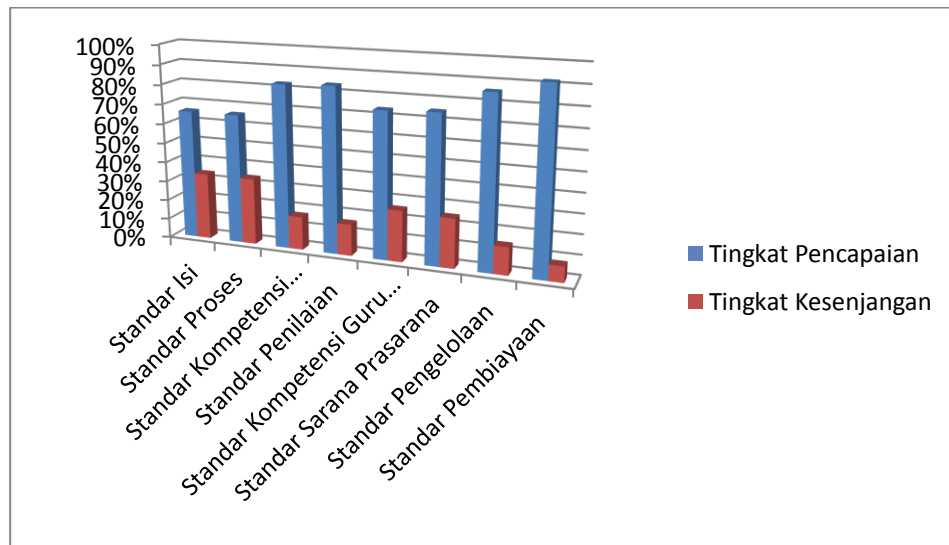
- 5) Menentukan penyebab kesenjangan antara kriteria standar pendidikan inklusif dengan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta.
- 6) Menghilangkan kesenjangan dengan membuat perubahan-perubahan terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Perubahan yang dimaksud adalah solusi yang dapat dilakukan oleh sekolah agar mencapai kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 10. Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif

No.	Komponen Penilaian	Indikator Pencapaian	Tingkat Pencapaian	Tingkat Kesenjangan	Ketercapaian Kriteria
1.	Standar isi	1	66.25 %	33.75 %	Baik
2.	Standar Proses	2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8	66.25 %	33.75 %	Baik
3.	Standar Kompetensi Lulusan	9, 10, dan 11	83.125 %	16.875 %	Sangat Baik
4.	Standar Penilaian	12, 13, 14, 15, dan 16	83.75 %	16.25 %	Sangat Baik
5.	Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	17, 18, dan 19	76.25 %	23.75 %	Sangat Baik
6.	Standar Sarana Prasarana	20	75 %	25 %	Baik
7.	Standar Pengelolaan	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28	85.625 %	14.375 %	Sangat Baik
8.	Standar Pembiayaan	29 dan 30	90.835 %	9.165 %	Sangat Baik
Rata-rata			78.39 %	21.61 %	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 9, ketercapaian penyelenggaraan pendidikan inklusif berdasar kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif oleh SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta secara keseluruhan sebesar 78.39 %, termasuk dalam kategori sangat baik. Tingkat kesenjangan dari indikator pencapaian mencapai 21.61 %.

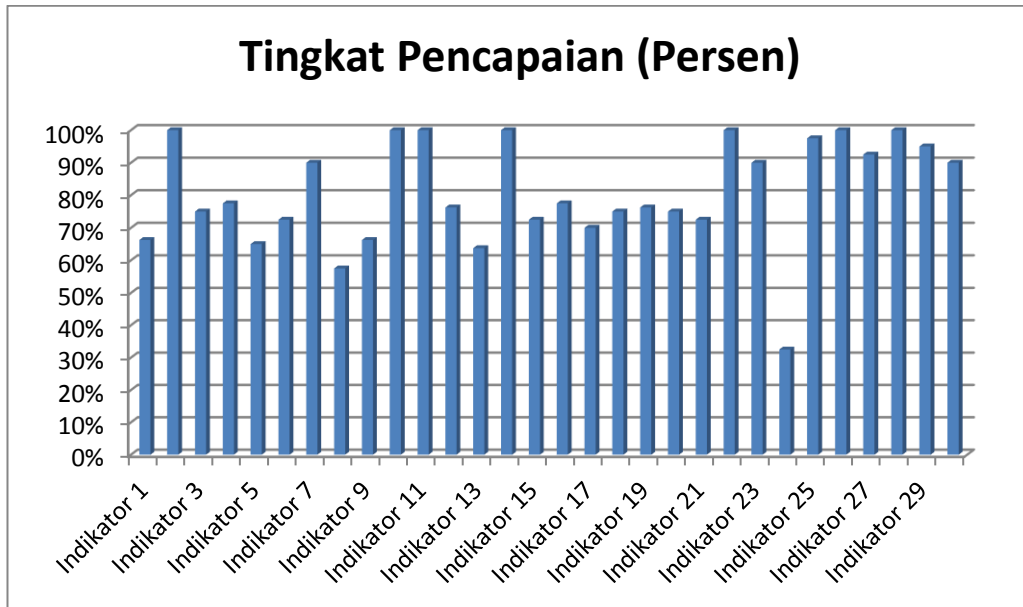


Gambar 2. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta Berdasarkan Komponen Penilaian

Penyelenggaraan pendidikan inklusif berdasarkan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta berdasarkan komponen penilaian terlihat bahwa seluruh perbandingan tingkat pencapaian dengan tingkat kesenjangan lebih besar tingkat pencapaian. Tingkat pencapaian kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif paling tinggi yaitu berdasarkan komponen penilaian standar pembiayaan dengan tingkat pencapaian sebesar 91.67 % dan kesenjangan sebesar 8.33 %. Tingkat pencapaian kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif paling rendah yaitu berdasarkan komponen penilaian standar isi dan standar proses yang hanya memperoleh tingkat pencapaian sebesar 66.25 % dengan kesenjangan sebesar 33.75 %.

Tingkat pencapaian kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah

Inklusif berdasarkan tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Diagram Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta Berdasarkan Indikator Pencapaian

Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta baru memenuhi 6 indikator pencapaian dan 24 indikator pencapaian belum terpenuhi. Menurut tingkat pencapaian secara umum, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh skor 78.49 %. Sedangkan tingkat kesenjangan SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta dalam pencapaian kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif sebesar 21.51 %.

Adanya tingkat kesenjangan sebesar 21.51 % dalam pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif dapat

diinterpretasikan bahwa ada hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Untuk itu penulis akan paparkan penyebab ketidaktercapaian setiap standar berdasarkan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif.

Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif dibagi menjadi 8, yaitu :

1) Standar Isi

Tabel 10. Standar isi (Indikator Pencapaian Nomor 1)

No	Komponen	Indikator Nomor	Skor Max	Skor	Tingkat Pencapaian (%)	Tingkat Kesenjangan (%)
1.	Pengembangan Kurikulum dan RPI	1	80	53	66.25 %	33.75 %
Rata-rata					66.25 %	33.75 %

SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta baru mencapai tingkat pencapaian 66.25 % untuk indikator 1. Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dan observasi, antara lain sebagai berikut. Sekolah masih belum memberikan kurikulum adaptif maupun RPI kepada seluruh ABK. Berdasarkan hasil kuesioner, jumlah ABK yang menerima kurikulum adaptif dan/atau RPI yakni sebesar 31-70 % ABK yang menerima kurikulum adaptif dan 1-30 % ABK yang menerima RPI. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan GPK, yang bertugas menyusun kurikulum adaptif dan/atau RPI bagi anak berkebutuhan khusus adalah GPK. Sedangkan berdasarkan

observasi yang peneliti lakukan didapatkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus tidak sebanding dengan jumlah GPK yang ada, yaitu 61 anak berkebutuhan khusus dan 3 orang guru pembimbing khusus. Sehingga jumlah antara GPK dengan ABK tidak sebanding. Bentuk kurikulum adaptif dan RPI yang diberikan masih sebatas penurunan tingkat kesulitan pelajaran dibanding dengan anak normal pada aspek penilaian. Kesenjangan dalam pelaksanaan indikator pencapaian ini sebesar 33.75 %.

2) Standar Proses

Tabel 11. Standar Proses (Indikator Pencapaian Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8)

No	Komponen	Indikator Nomor	Skor Max	Skor	Tingkat Pencapaian (%)	Tingkat Kesenjangan (%)
1.	Pelaksanaan Asesmen Awal	2	40	40	100 %	0 %
2.	Pelaksanaan Kurikulum dan RPI	3	40	30	75 %	25 %
3.	Setting Kelas	4	40	31	77.5 %	22.5 %
4.	Materi Belajar	5	40	26	65 %	35 %
5.	Strategi Mengajar	6	40	29	72.5 %	27.5 %
6.	Cara Berkomunikasi dengan ABK	7	40	36	90 %	10 %
7.	Pendampingan Teman Sebaya	8	40	23	57.5 %	42.5 %
Rata-rata					66.25 %	33.75 %

SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah mencapai tingkat pencapaian 100 % untuk indikator 2. Hal itu berarti untuk indikator pencapaian 2 tidak terdapat kesenjangan atau kesenjangananya 0 %. Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dan observasi, antara lain sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sekolah selalu melakukan asesmen awal setiap tahun ajaran baru bagi peserta didik baru, siswa pindahan dan siswa yang sekiranya membutuhkan asesmen ulang. Pelaksanaan asesmen melibatkan ahli lain yaitu psikolog.

Untuk indikator pencapaian 3, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta baru memperoleh tingkat pencapaian 75 %. Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dan observasi, antara lain sebagai berikut. Sekolah tidak selalu melaksanakan kurikulum adaptif dan/atau RPI yang telah disusun sebelumnya. Guru reguler lebih berfokus pada penurunan tingkat kesulitan pelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Sedangkan yang melaksanakan kurikulum adaptif dan/atau RPI adalah GPK yang mendampingi masing-masing anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan GPK dan guru kelas, pelaksanaan kurikulum adaptif dan/atau RPI lebih diterapkan dalam aspek penilaian dibanding proses pembelajaran. Kesenjangan dalam indikator pencapaian ini sebesar 25 %.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru regular dan GPK, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta menerapkan perubahan setting kelas 2 kali dalam setahun atau dalam setiap semester. Setting kelas yang biasanya sekolah gunakan adalah setting kelas U dan setting teater. Hal itu sesuai dengan kriteria dalam indikator pencapaian, sehingga SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian 77.5 % dan kesenjangan sebesar 22.5 %.

Untuk indikator 5, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh indikator pencapaian 65 %. Guru regular hanya sesekali membawa materi belajar tambahan bagi anak berkebutuhan khusus, selebihnya disamakan dengan anak normal lainnya. Kesenjangan dalam indikator pencapaian ini sebesar 35%.

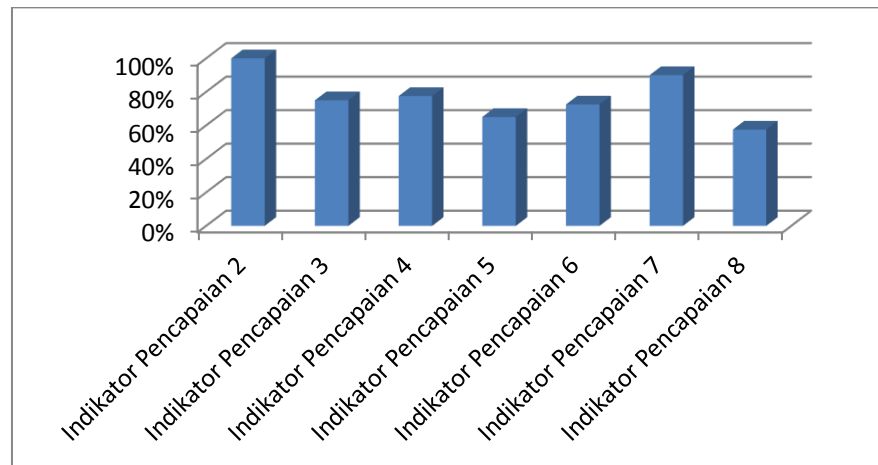
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, strategi mengajar yang guru gunakan belum sesuai dengan seluruh jenis anak berkebutuhan khusus. Hanya beberapa jenis anak berkebutuhan khusus, seperti tunadaksa, tunagrahita dan lamban belajar. Sehingga pada indikator 6 SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian 72.5 % dan kesenjangan sebesar 27.5 %.

Sedangkan untuk indikator 7, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian 90 %. Tingkat keragaman disabilitas di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta

tergolong rendah dan tidak memerlukan cara berkomunikasi khusus. Hal ini terlihat dari hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan SD Negeri 5 Bangunrejo 2 Yogyakarta memiliki 5 jenis ABK, yaitu tunadaksa, tunagrahita, autis, lamban belajar dan kesulitan belajar. Di mana sebagian besar dari ABK tersebut mampu berkomunikasi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara guru sedikit mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan anak autis. Kesenjangan dalam indikator pencapaian ini sebesar 10%.

Untuk indikator pencapaian 8 SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian sebesar 57.5 % . SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta menggunakan *peer tutor* atau pendampingan teman sebaya dalam pelaksanaan pembelajarannya. Tidak semua ABK mendapatkan pendampingan teman sebaya, hal ini dikarenakan sebagian besar ABK sudah mampu bersosialisasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa perlu pendampingan. Serta sebagian kecil lainnya masih membutuhkan pendampingan langsung dari GPK. Kesenjangan dalam indikator pencapaian ini sebesar 42.5 %.

Ketercapaian kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif indikator 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dapat dilihat dalam diagram berikut:



Gambar 4. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif Berdasarkan Komponen Penilaian Standar Proses

Dalam hal standar proses, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memenuhi kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif untuk indikator 2 mengenai pelaksanaan asesmen awal. Namun untuk indikator 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 mengenai pelaksanaan kurikulum dan RPI, setting kelas, materi belajar, strategi mengajar, cara berkomunikasi dengan ABK, dan pendampingan teman sebaya belum memenuhi kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif.

3) Standar Kompetensi Lulusan

Tabel 12. Standar Kompetensi Lulusan (Pencapaian Indikator Nomor 9, 10, dan 11)

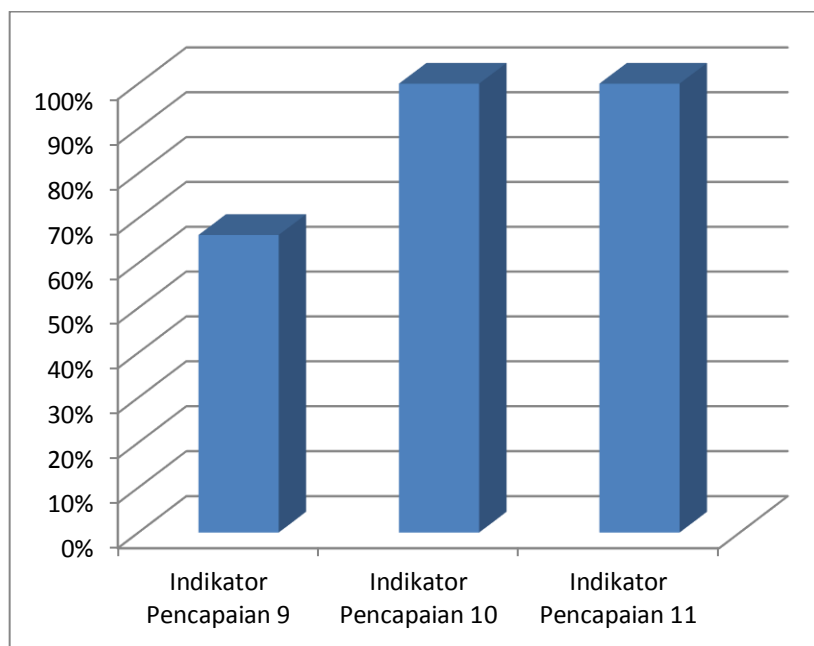
No	Komponen	Indikator Nomor	Skor Max	Skor	Tingkat Pencapaian (%)	Tingkat Kesenjangan (%)
1.	Program Pengembangan Bakat dan Program Kompensatoris	9	80	53	66.25 %	33.75 %
2.	Kelulusan (UN)	10 dan 11	80	80	100 %	0 %
Rata-rata					83.125 %	16.875 %

SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah mencapai tingkat pencapaian 66.25 % pada indikator pencapaian 9. Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dan observasi, antara lain sebagai berikut. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memiliki program pengembangan bakat. Program pengembangan bakat ini diberikan kepada seluruh peserta didik di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa program pengembangan bakat yang diberikan disamaratakan bagi semua jenis kekhususan ABK. Program pengembangan bakat yang sekolah berikan berupa live skill, yaitu membuat, gerabah, masak, bengkel, kerajinan manik-manik, dan kerajinan *flannel*. Selain program pengembangan bakat, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta juga memiliki program kompensatoris bagi ABK. ABK

yang mengikuti program kompensatoris ditentukan berdasarkan hasil asesmen. Berdasarkan hasil wawancara dengan GPK, ABK yang mendapat program kompensatoris adalah anak tunagrahita dengan program yang diberikan adalah *Activity Daily Living (ADL)*. Kesenjangan dalam indikator pencapaian ini sebesar 33.75 %.

Untuk indikator 10 dan 11, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian sebesar 100 %. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah 2 tahun meluluskan ABK. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, selama 2 tahun ini seluruh ABK yang mengikuti UN dan/atau USEK dinyatakan lulus. ABK yang lulus melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP PGRI Yogyakarta, yaitu SMP yang ditunjuk oleh Dinas sebagai SMP Inklusif. Hingga kini SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta terus memantau perkembangan pendidikan dari lulusan ABK tersebut. Oleh karena itu, dalam indikator pencapaian ini tidak terdapat kesenjangan atau kesenjangan 0 %.

Ketercapaian kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif indikator 9, 10, dan 11 dapat dilihat dalam diagram berikut:



Gambar 5. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif Berdasarkan Komponen Penilaian Standar Kompetensi Lulusan

Dalam hal standar kompetensi lulusan, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memenuhi kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif untuk indikator 10 dan 11 mengenai kelulusan (UN). Namun untuk indikator 9 mengenai program pengembangan bakat dan program kompensatoris belum memenuhi kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif.

4) Standar Penilaian

Tabel 13. Standar Penilaian (Indikator Pencapaian Nomor 12, 13, 14, 15 dan 16)

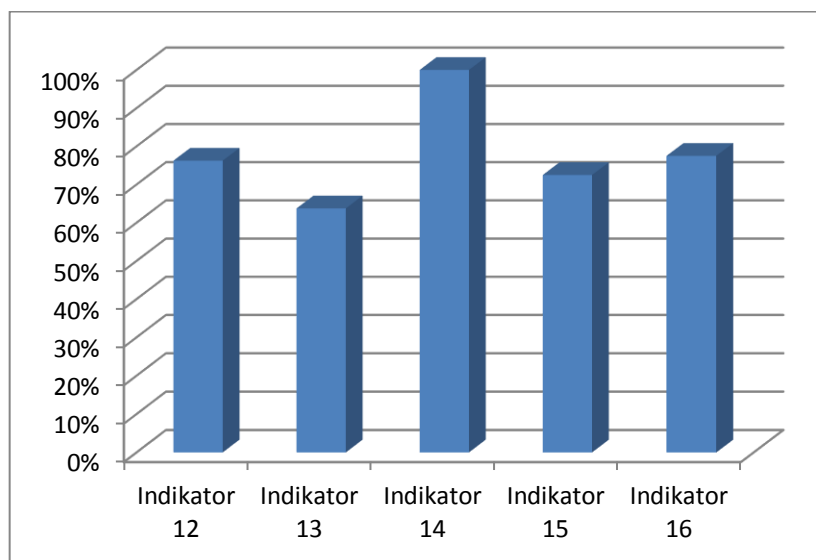
No	Komponen	Indikator Nomor	Skor Max	Skor	Tingkat Pencapaian (%)	Tingkat Kesenjangan (%)
1.	Penentuan KKM & SKL	12	80	61	76.25 %	23.75 %
2.	Pelaksanaan UN dan USEK Bagi ABK	13	80	51	63.75 %	36.25 %
3.	STTB dan Laporan Perkembangan Hasil Belajar ABK ke Orangtua	14 dan 15	80	69	86.25 %	13.75 %
4.	Pihak yang Terkait Dalam Proses Menilai	16	40	31	77.5 %	22.5 %
Rata-rata					83.75 %	16.25 %

SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memperoleh tingkat pencapaian 76.25 % pada indikator pencapaian 12. Berdasarkan hasil kuesioner, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah menentukan secara khusus SKL bagi 1-30 % ABK dan menentukan secara khusus KKM bagi 31-70 % ABK. Berdasarkan hasil wawancara dengan GPK, bagi ABK dengan kondisi kelainan yang cukup berat dan kemampuan yang cukup rendah dilakukan penurunan tingkat SKL maupun KKM. Sedangkan bagi ABK dengan kondisi ringan disamaratakan dengan anak normal lainnya,

serta dilengkapi dengan catatan-catatan tentang deskripsi kemampuan siswa. Kesenjangan indikator pencapaian ini adalah 23.75 %.

Untuk indikator pencapaian 13, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memperoleh tingkat pencapaian 63.75 %. Jumlah ABK yang mengikuti UN dan USEK sekitar 31 – 70 %. Sedangkan ABK yang hanya mengikuti USEK hanya sekitar 1-30 %. Kesenjangan dalam indikator pencapaian ini sebesar 36.25 %. Sedangkan pada indikator pencapaian 14 dan 15, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh indikator pencapaian 86.25 % dan tingkat kesenjangan sebesar 13.75 %. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah 2 tahun menerbitkan atau memberikan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) kepada setiap ABK yang lulus USEK. Berdasarkan hasil wawancara dengan GPK, GPK rutin memberikan laporan perkembangan ABK setiap harinya kepada guru kelas. Namun guru kelas hanya melaporkan perkembangan ABK kepada orangtua murid 2 kali dalam setahun atau setiap pembagian rapor.

Ketercapaian kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif indikator 12, 13, 14, 15, dan 16 dapat dilihat dalam diagram berikut :



Gambar 6. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif Berdasarkan Komponen Penilaian Standar Penilaian

Dalam hal standar penilaian, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memenuhi kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif untuk indikator 14 mengenai STTB. Namun untuk indikator 12, 13, 15, dan 16 mengenai penentuan KKM dan SKL, pelaksanaan UN dan USEK bagi ABK, laporan hasil belajar ABK ke orangtua, dan pihak yang terkait dalam menilai belum memenuhi kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif.

5) Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Tabel 14. Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (Indikator Pencapaian Nomor 17, 18 dan 19)

No	Komponen	Indikator Nomor	Skor Max	Skor	Tingkat Pencapaian (%)	Tingkat Kesenjangan (%)
1.	Pelatihan Guru oleh Dinas	17 dan 18	80	61	76.25 %	23.75 %
2.	Kompetensi GPK	19	160	122	76.25 %	23.75 %
Rata-rata					76.25 %	23.75 %

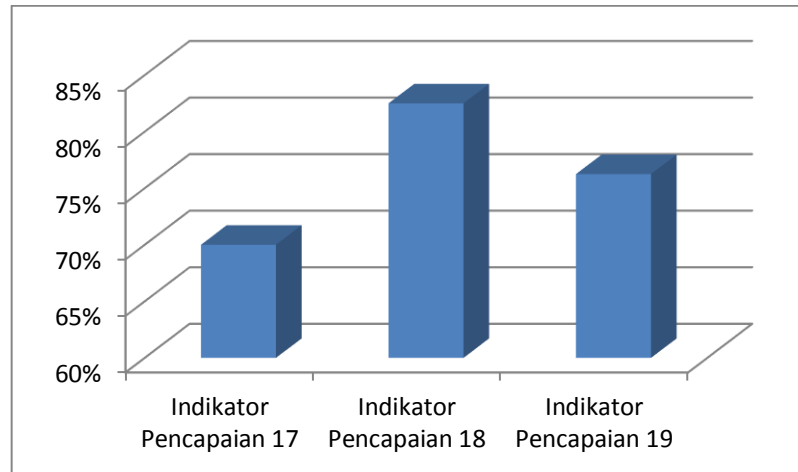
SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memperoleh tingkat pencapaian sebesar 72.5 % pada indikator 17 dan 18. Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dan observasi, antara lain sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru reguler, belum semua guru mendapatkan pelatihan. Penentuan guru yang mengikuti pelatihan inklusif di dasarkan pada waktu luang masing-masing guru. Hasil dari pelatihan inklusif yang guru ikuti hanya disosialkan dengan sesama guru di sekolah. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta rutin mengikuti pelatihan maupun seminar yang diselenggarakan baik oleh Dinas maupun Lembaga dan/atau Institusi Pendidikan seperti UNY. Beberapa topik pelatihan pendidikan inklusif yang pernah guru ikuti di antaranya adalah seminar nasional konsep pendidikan inklusif, penerapan *peer tutor*, modifikasi dan akomodasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus, identifikasi dan

asesmen, dan pengembangan kurikulum. Kesenjangan dalam indikator pencapaian ini sebesar 27.5 %.

Pada indikator pencapaian 19, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta mendapatkan tingkat pencapaian sebesar 76.25 %. Seluruh GPK di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta berlatar belakang pendidikan S1 PLB. Peran GPK di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta hanya sebatas mendampingi anak berkebutuhan khusus, GPK tidak memberi pendampingan konsultatif kepada guru reguler. Selain itu, dikarenakan jumlah GPK dan ABK yang tidak sebanding. Maka GPK tidak dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus yang ada. Kesenjangan dalam indikator pencapaian ini adalah 23.75 %.

Ketercapaian kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah

Inklusif indikator 17, 18, dan 19 dapat dilihat dalam diagram berikut:



Gambar 7. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif Berdasarkan Komponen Penilaian Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam hal standar kompetensi guru dan tenaga pendidik, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta belum memenuhi seluruh indikator yaitu 17, 18, dan 19 mengenai pelatihan guru oleh Dinas dan kompetensi GPK.

6) Standar Sarana Prasarana

Tabel 15. Standar Sarana Prasarana (Indikator Pencapaian Nomor 20)

No	Komponen	Indikator Nomor	Skor Max	Skor	Tingkat Pencapaian (%)	Tingkat Kesenjangan (%)
1.	Sarana Prasarana	20	40	30	75 %	25 %
Rata-rata					75 %	25 %

SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian 75 % pada indikator pencapaian 20 dan kesenjangan sebesar 25 %. Dikarenakan jumlah keragaman jenis ABK yang rendah di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, maka sekolah belum memiliki sarana prasarana yang lengkap bagi setiap jenis ABK. Sarana prasarana yang sekolah miliki disesuaikan dengan jenis peserta didik berkebutuhan khusus yang ada. Sarana prasarana bagi ABK yang sekolah miliki di antaranya adalah jalan yang landai, kursi roda, dan kamar mandi bagi pengguna kursi roda. Namun pada ketersediaan sarana prasarana alat peraga dan media pembelajaran di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta masih minim.

7) Standar Pengelolaan

Tabel 16. Standar Pengelolaan (Indikator Pencapaian Nomor 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28)

No	Komponen	Indikator Nomor	Skor Max	Skor	Tingkat Pencapaian (%)	Tingkat Kesenjangan (%)
1.	Sekolah Terbuka Terhadap ABK	21	40	29	72.5 %	27.5 %
2.	RPS	22	40	40	100 %	0 %
3.	Koordinator Inklusi	23	40	36	90 %	10 %
4.	Kebijakan Sekolah (Pengulangan Kelas)	24	40	13	32.5 %	67.5 %
5.	Peran Orangtua	25	40	39	97.5 %	2.5 %
6.	Laporan Rutin Kepala Sekolah	26	40	40	100 %	0 %
7.	Jaringan Sekolah	27	80	74	92.5 %	7.5 %
8.	Dukungan Pemerintah	28	80	80	100 %	0 %
Rata-rata					85.625 %	14.375 %

SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah mencapai tingkat pencapaian 72.5 % pada indikator pencapaian 21. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta hanya terbuka pada beberapa jenis ABK. Sekolah tidak menerima seluruh jenis siswa berkebutuhan khusus, dikarenakan sarana prasarana dan tenaga ahli yang terbatas. Kesenjangan dalam indikator pencapaian ini adalah 27.5 %.

Untuk indikator 22, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian sebesar 100 %. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memasukkan segala komponen pendidikan inklusi ke dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) seperti sarana prasarana, tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam indikator pencapaian ini tidak terdapat kesenjangan atau kesenjangan 0%.

SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memperoleh tingkat pencapaian 90 % dalam indikator pencapaian 23. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memiliki seorang koordinator/manajer pendidikan inklusif yang cukup aktif. Kesenjangan dalam indikator pencapaian ini adalah 10 %.

Untuk indikator pencapaian 24 SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian sebesar 32.5 %. Dalam kebijakan pengurangan kelas bagi ABK, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta menyamaratakan kebijakan dengan anak normal lainnya. Hal ini dikarenakan SD Negeri Bangunrejo 2 telah menerapkan KKM dan SKL sesuai dengan kemampuan beberapa jenis ABK. Menurut Tim ASB (2011 : 57) sekolah sebaiknya meminimalisir pengurangan kelas, hal ini dikarenakan pengurangan kelas merugikan Dinas Pendidikan dan orangtua anak berkebutuhan

khusus dari segi waktu dan pembiayaan. Sudah seharusnya sekolah memberikan solusi dalam mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, kesenjangan dalam indikator pencapaian ini sebesar 67.5%.

Untuk indikator pencapaian 25, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian sebesar 97.5 % dengan tingkat kesenjangan sebesar 2.5 %. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta melibatkan orangtua murid ke dalam komite sekolah. Sehingga orangtua murid baik dari anak berkebutuhan khusus maupun anak normal berperan serta dalam pengembangan sekolah termasuk dalam aspek penyelenggaraan program pendidikan inklusif.

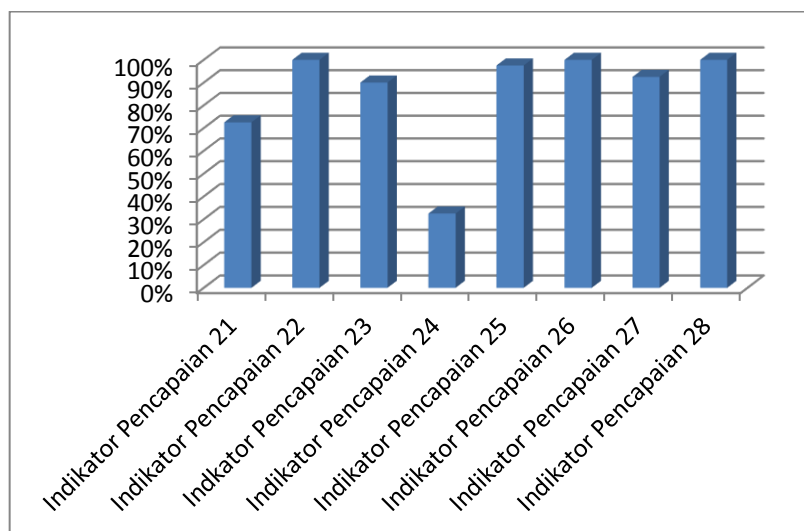
SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian 100 % dalam indikator pencapaian 26. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Kepala Sekolah secara rutin melaporkan perkembangan data anak berkebutuhan khusus kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. karena itu, dalam indikator pencapaian ini tidak terdapat kesenjangan atau kesenjangan 0 %.

Untuk indikator pencapaian 27, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian sebesar 92.5 %. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta melakukan kerjasama atau berjejaring dengan sekolah jenjang di atasnya, yaitu SMP PGRI. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, SMP PGRI

merupakan SMP yang ditunjuk langsung oleh Dinas Pendidikan sebagai sekolah lanjutan bagi lulusan anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Namun SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta tidak melakukan kerjasama atau jejaring dengan lembaga-lembaga swasta lainnya demi mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sekolah hanya berjejaring dengan Dinas Pendidikan dan SMP PGRI Yogyakarta. Oleh karena itu, tingkat kesenjangan dalam indikator pencapaian ini adalah sebesar 7.5%.

Untuk indikator pencapaian 28, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian sebesar 100 %. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memiliki surat penunjukkan sekolah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2008. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta juga mendapat dukungan dari Pemerintah secara rutin, baik dalam berupa bantuan dana maupun bantuan fisik seperti sarana prasarana dan media pembelajaran. Oleh karena itu, tingkat kesenjangan dalam indikator pencapaian 28 adalah sebesar 0 %.

Ketercapaian kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif indikator 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28 dapat dilihat dalam diagram berikut :



Gambar 8. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif Berdasarkan Komponen Penilaian Standar Pengelolaan

Dalam hal standar penilaian, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memenuhi kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif untuk indikator 22, 26, 28 mengenai RPS, laporan rutin kepala sekolah, dan dukungan pemerintah. Namun untuk indikator 21, 23, 24, 25, dan 27 mengenai sekolah terbuka terhadap ABK, koordinator inklusi, kebijakan sekolah (pengurangan kelas), peran orangtua, dan jaringan sekolah belum memenuhi kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif.

8) Standar Pembiayaan

Tabel 17. Standar Pembiayaan (Indikator Pencapaian Nomor 29 dan 30)

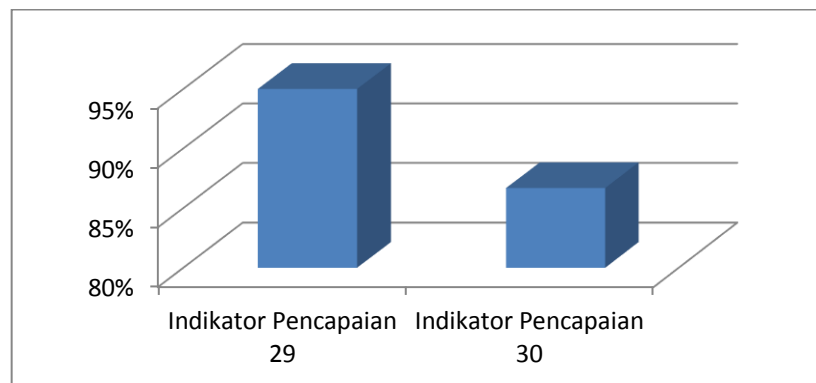
No	Komponen	Indikator Nomor	Skor Max	Skor	Tingkat Pencapaian (%)	Tingkat Kesenjangan (%)
1.	RAPBS	29	40	38	95 %	5 %
2.	Dana Tambahan	30	80	64	86.67 %	13.33 %
3.	Lapor Dana	30	40	40		
Rata-rata					90.835 %	9.165 %

SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian 95 % dalam indikator pencapaian 29. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memasukkan komponen pendidikan inklusif ke dalam RAPBS/RAKS, seperti sarana prasarana, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Kesenjangan dalam indikator pencapaian ini adalah sebesar 5 %.

Untuk indikator 30 terdapat dua aspek komponen penilaian, yaitu dana tambahan dan lapor dana. Pada aspek dana tambahan, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian 8 % dan kesenjangan sebesar 20 %. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta mendapatkan dana tambahan yang bersumber dari Dinas Pendidikan secara rutin. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta tidak mendapatkan dana tambahan dari luar atau dari lembaga swasta. Hal ini dikarenakan sekolah tidak berjejaring dengan lembaga di luar

Dinas Pendidikan. Sedangkan pada aspek lapor dana, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta memperoleh tingkat pencapaian sebesar 100 %. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta khususnya Kepala Sekolah, secara rutin selalu melaporkan penggunaan dana secara sistematis. Oleh karena itu, tingkat kesenjangan yang diperoleh adalah 0 %.

Ketercapaian kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif indikator 29 dan 30 dapat dilihat dalam diagram berikut :



Gambar 9. Diagram Tingkat Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif Berdasarkan Komponen Penilaian Standar Pembiayaan

Dalam hal standar penilaian, SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta belum memenuhi kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif untuk indikator 29 dan 30 mengenai RAPBS, dana tambahan dan lapor dana.

Tabel 18. Rangkuman Hasil Penelitian dan *Judgement*

No.	Standar Penilaian	Indikator Nomor	Indikator	Skor yang dicapai	Realitas Capai	<i>Judgement</i> (Perbandingan antara skor yang dicapai dengan realitas capai)
1.	Standar Isi	1	Setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan kurikulum yang telah dikembangkan dengan model adaptasi dan/atau modifikasi maupun model program pembelajaran individual yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus.	66.25 %	Sekolah telah memiliki PPI dengan penyesuaian pada aspek evaluasi. Namun sekolah tidak memiliki data dokumentasi PPI. Tidak adanya dokumentasi dikarenakan GPK tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Hal ini disebabkan tidak sebandingnya jumlah GPK dengan ABK.	Sekolah belum sesuai dengan standar. Seharusnya sekolah telah memiliki data dokumentasi pengembangan kurikulum adaptif dan/atau PPI bagi setiap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ABK.
2.	Standar Proses	2	Setiap anak berkebutuhan khusus yang akan menerima pembelajaran telah diidentifikasi dan diasesmen secara sistematis setiap tahun.	100 %	Sekolah selalu melakukan asesmen awal setiap tahun ajaran baru bagi peserta didik baru, siswa pindahan dan siswa yang sekiranya membutuhkan asesmen ulang.	Sekolah telah sesuai dengan standar.

		3	Guru melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan RPI yang disusun.	75 %	Sekolah tidak selalu melaksanakan kurikulum adaptif dan/atau RPI yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kurikulum adaptif dan/atau RPI lebih diterapkan dalam aspek penilaian disbanding proses pembelajaran.	Sekolah belum melaksanakan proses pembelajaran sesuai standar. Seharusnya sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran selalu menerapkan kurikulum adaptif dan/atau RPI yang telah disusun sebelumnya.
		4	Guru mengubah <i>setting</i> kelas lebih dari satu jenis <i>setting</i> kelas setiap satu minggu sekali	77.5 %	Beberapa guru melakukan perubahan <i>setting</i> kelas setiap semester, beberapa guru lainnya melaksanakan setiap bulan dan bahkan setiap minggu.	Pengubahan <i>setting</i> kelas belum sesuai standar, seharusnya seluruh guru melakukan pengubahan <i>setting</i> kelas lebih dari satu jenis <i>setting</i> kelas setiap satu minggu sekali.
		5	Guru menyediakan materi belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajar setiap anak berkebutuhan khusus untuk masing-masing subjek pengajaran.	65 %	Guru reguler hanya sesekali membawa materi belajar tambahan bagi ABK, selebihnya disamakan dengan anak normal.	Belum sesuai standar. Seharusnya guru menyediakan materi belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajar setiap anak berkebutuhan khusus untuk masing-masing subjek pengajaran.
		6	Guru menerapkan strategi dan praktik mengajar yang	72.5 %	Strategi mengajar yang guru gunakan belum sesuai dengan seluruh jenis anak	Belum sesuai standar. Strategi mengajar yang guru terapkan seharusnya

			disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus.		berkebutuhan khusus. Hanya beberapa jenis anak berkebutuhan khusus, seperti tunadaksa, tunagrahita dan lamban belajar.	disesuaikan dengan kelima jenis anak berkebutuhan di sekolah.
		7	Guru menerapkan kecakapan berkomunikasi yang sesuai dengan karakteristik setiap anak berkebutuhan khusus.	90 %	Dari kelima jenis ABK, guru mampu berkomunikasi dengan 4 jenis ABK yaitu tunadaksa, tunagrahita, lamban belajar dan kesulitan belajar. Guru mengalami kesulitan berkomunikasi dengan anak autis.	Belum sesuai standar. Guru seharusnya memiliki kecakapan berkomunikasi dengan kelima jenis anak berkebutuhan khusus.
		8	Setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendampingan baik oleh guru, GPK dan teman sebaya.	57.5 %	Tidak semua ABK mendapatkan pendampingan oleh GPK maupun teman sebaya, hal ini dikarenakan sebagian besar ABK telah mampu beradaptasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik secara mandiri.	Belum sesuai standar. Seharusnya setiap ABK mendapatkan pendampingan baik oleh guru, GPK, maupun teman sebaya.
3.	Standar Kompetensi Lulusan	9	Setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan program pengembangan bakat dan program kompensatoris sesuai dengan potensi dan	66.25 %	Dalam program pengembangan bakat disamaratakan dengan anak normal. Namun untuk program kompensatoris diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ABK.	Belum sesuai standar. Seharusnya setiap anak berkebutuhan khusus mendapatkan program pengembangan bakat sesuai dengan potensi dan kebutuhannya masing-

			kebutuhan anak berkebutuhan khusus.			masing.
		10	Setiap ABK lulus UN/USEK setiap tahunnya.	100 %	SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah 2 tahun meluluskan ABK dan seluruh ABK dinyatakan lulus.	Telah sesuai standar karena seluruh ABK lulus UN/USEK setiap tahunnya.
		11	Setiap anak berkebutuhan khusus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.	100 %	ABK yang telah lulus dari SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta melanjutkan sekolah di SMP PGRI Yogyakarta.	Telah sesuai standar karena setiap ABK yang lulus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
4.	Standar Penilaian	12	Penentuan SKL dan KKM yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap anak berkebutuhan khusus.	76.25 %	Bagi ABK dengan kondisi kelainan yang cukup berat dan kemampuan yang cukup rendah dilakukan penurunan tingkat SKL maupun KKM. Sedangkan bagi ABK dengan kondisi ringan disamaratakan dengan anak normal lainnya, serta dilengkapi dengan catatan-catatan tentang deskripsi kemampuan siswa.	Belum sesuai standar, karena belum semua ABK mendapatkan KKM dan SKL yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap ABK. Seharusnya Penentuan KKM dan SKL diterapkan bagi semua ABK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap ABK.
		13	Setiap anak berkebutuhan khusus mengikuti UN dan USEK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak	63.75 %	Jumlah ABK yang mengikuti UN dan USEK sekitar 31 – 70 %. Sedangkan ABK yang hanya mengikuti USEK hanya sekitar 1-30 %.	Belum sesuai dengan standar, seharusnya setiap anak berkebutuhan khusus mengikuti UN dan USEK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak

			berkebutuhan khusus.			berkebutuhan khusus.
		14	Setiap anak berkebutuhan khusus yang dinyatakan lulus USEK mendapatkan STTB.	100 %	Sekolah selalu menerbitkan STTB bagi ABK,	Penerbitan STTB telah sesuai dengan standar.
		15	Setiap satu bulan sekali sekolah melaporkan hasil pembelajaran anak berkebutuhan khusus secara rutin kepada orangtua, yang tidak hanya berupa angka/skor namun disertai dengan beberapa komentar naratif.	72.5 %	Laporan perkembangan belajar yang sekolah berikan hanya dilakukan setiap akhir semester.	Laporan perkembangan ABK belum sesuai dengan standar. Seharusnya sekolah melaprkan perkembangan ABK setidaknya setiap satu bulan sekali.
		16	Semua pihak (Guru kelas, GPK dan orangtua) selalu terlibat dalam proses penyesuaian/pengembangan penilaian hasil belajar anak.	77.5 %	Baik guru kelas maupun GPK selalu bekerjasama dalam melakukan penilaian bagi ABK, namun penilaian akhir menjadi keputusan guru kelas.	Keterlibatan berbagai pihak dalam proses penilaian hasil belajar ABK belum sesuai standar. Seharusnya seluruh pihak terlibat proses penilaian baik guru kelas, GPK, dan orangtua.
5.	Standar Kompetensi Guru dan	17	Perwakilan guru dari sekolah telah mengikuti semua	70 %	Sebagian besar topik pelatihan pernah guru ikuti.	Belum sesuai standar, karena belum semua topik pelatihan guru ikuti.

Tenaga Kependidikan		pelatihan tentang pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus.			Seharusnya perwakilan guru dari sekolah telah mengikuti semua pelatihan tentang pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus.
	18	Guru reguler yang telah menerima pelatihan telah melakukan sosialisasi pendidikan inklusif kepada rekan sejawat, masyarakat, dan sekolah lain.	82.5 %	Guru reguler yang telah menerima pelatihan telah melakukan kepada rekan sejawat.	Belum sesuai standar, seharusnya guru reguler yang telah menerima pelatihan melakukan sosialisasi pendidikan inklusif tidak hanya kepada rekan sejawat, melainkan juga masyarakat, dan sekolah lain.
	19	GPK yang membantu program pendidikan inklusif memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1) pendidikan luar biasa (ortopedagog) dan telah berpengalaman di bidangnya dalam memahami ABK. GPK datang ke sekolah lebih dari dua kali dalam seminggu	76.25 %	Seluruh GPK berlatar belakang pendidikan S1-PLB, namun peran mereka di sekolah hanya sebatas mendampingi ABK dan belum memberikan dampingan konsultatif kepada guru reguler. GPK datang setiap hari ke sekolah.	Belum memenuhi standar, seharusnya GPK tidak hanya mendampingi pembelajaran ABK melainkan juga memberikan dampingan konsultatif kepada guru reguler.

			dan memberikan dampingan konsultatif kepada guru reguler. Serta setiap ABK mendapatkan pendampingan pembelajaran yang optimal.			
6.	Standar Sarana Prasarana	20	Sarana dan prasarana belajar tersedia sesuai dengan seluruh jenis disabilitas ABK.	75 %	Sarana prasarana yang tersedia belum memadai bagi berbagai jenis disabilitas.	Sarana prasarana yang tersedia belum sesuai standar. Seharusnya sarana prasarana yang tersedia memadai bagi seluruh jenis disabilitas ABK yang ada di sekolah.
7.	Standar Pengelolaan	21	Sekolah terbuka untuk menerima semua jenis disabilitas anak berkebutuhan khusus.	72.5 %	SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta hanya terbuka pada beberapa jenis ABK.	Sekolah belum memenuhi standar. Seharusnya sekolah terbuka dalam menerima semua jenis disabilitas ABK.
		22	Sekolah telah memasukkan komponen pendidikan inklusi ke dalam dokumen Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan telah terlaksana	100 %	SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memasukkan segala komponen pendidikan inklusi ke dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) seperti sarana prasarana, tenaga pendidik, dan lain sebagainya.	Sekolah telah sesuai dengan standar, yaitu memasukkan dan melaksanakan komponen pendidikan inklusif dalam RPS.

		23	Sekolah memiliki koordinator/manajer pendidikan inklusif yang aktif.	90 %	SD Negeri Bangurejo 2 Yogyakarta telah memiliki seorang koordinator/manajer pendidikan inklusif yang cukup aktif.	Sekolah belum memenuhi standar, seharusnya sekolah memiliki koordinator/manajer pendidikan inklusif yang aktif dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.
		24	Sekolah melaksanakan kebijakan (meminimalisir pengulangan kelas) bagi anak berkebutuhan khusus dengan tidak mengenai pengulangan kelas bagi ABK.	32.5 %	SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta menyamaratakan kebijakan dengan anak normal lainnya.	Sekolah belum sesuai dengan standar. Sekolah seharusnya tidak mengenai pengulangan kelas bagi ABK.
		25	Terdapat orangtua ABK yang mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah.	97.5 %	SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta melibatkan orangtua murid ke dalam komite sekolah. Sehingga orangtua murid baik dari anak berkebutuhan khusus maupun anak normal berperan serta dalam pengembangan sekolah	Belum sesuai dengan standar. Seharusnya orangtua ABK mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah.

					termasuk dalam aspek penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Namun terkadang beberapa orangtua menghambat kegiatan pendidikan inklusif di sekolah.	
		26	Kepala sekolah melaporkan secara rutin data anak berkebutuhan khusus kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.	100 %	Kepala Sekolah secara rutin melaporkan perkembangan data anak berkebutuhan khusus kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.	Sekolah telah sesuai dengan standar.
		27	Sekolah telah berjejaring dengan stakeholder lain (sekolah jenjang di atasnya, pemerintah dan lembaga swasta) dalam mendukung pendidikan inklusif di sekolah dengan terikat oleh MoU yang telah ditandatangani.	92.5 %	Sekolah telah berjejaring dengan Dinas Pendidikan dan SMP PGRI Yogyakarta.	Sekolah belum sesuai dengan standar, seharusnya sekolah tidak hanya berjejaring dengan sekolah jenjang di atasnya dan Dinas Pendidikan, namun juga berjejaring dengan lembaga swasta.
		28	Terdapat dukungan dari pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di	100 %	SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta telah memiliki surat penunjukkan sekolah sebagai sekolah penyelenggara	Sekolah telah sesuai dengan standar.

			sekolah. Serta sekolah telah bekerjasama dengan sekolah jenjang di atasnya guna kelanjutan pendidikan ABK.		pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2008. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta juga mendapat dukungan dari Pemerintah secara rutin, baik dalam berupa bantuan dana maupun bantuan fisik seperti sarana prasarana dan media pembelajaran.	
8.	Standar Pembiayaan	29	Setiap tahun sekolah memasukkan komponen pendidikan inklusif ke dalam dokumen RAPBS/RAKS.	95 %	SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta hampir setiap tahun telah memasukkan komponen pendidikan inklusif ke dalam RAPBS/RAKS, seperti sarana prasarana, media pembelajaran, dan lain sebagainya.	Sekolah belum sesuai dengan standar, seharusnya sekolah memasukkan komponen pendidikan inklusif ke dalam dokumen RAPBS/RAKS setiap tahun.
		30	Sekolah menerima dan melaporkan penggunaan dana subsidi secara sistematis.	86.67 %	SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta mendapatkan dana tambahan yang bersumber dari Dinas Pendidikan secara rutin. Namun tidak mendapatkan dana tambahan dari luar atau dari lembaga swasta. Kepala sekolah secara rutin selalu melaporkan penggunaan dana secara sistematis.	Sekolah belum sesuai dengan standar, seharusnya sekolah menerima dan melaporkan penggunaan dana subsidi secara sistematis baik dari pemerintah maupun lembaga swasta.

b. Kendala-kendala Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, guru reguler, dan guru pembimbing khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pembimbing khusus (Rabu, 15 Juni 2016) mengatakan bahwa yang menjadi kendala adalah kurangnya jumlah guru pembimbing khusus dikarenakan tidak sebandingnya jumlah GPK dengan jumlah ABK. Sehingga dalam perancangan kurikulum adaptif dan RPI, GPK tidak mampu merancang untuk seluruh ABK yang ada. Kendala lainnya adalah kurangnya kerjasama antara guru kelas dengan GPK, kurangnya pemahaman guru kelas terhadap ABK dan pendidikan inklusif, serta sarana prasarana hanya untuk beberapa jenis disabilitas. Sedangkan hasil wawancara dengan kepala sekolah (Selasa, 14 Juni 2016) mengatakan bahwa yang menjadi kendala adalah beberapa orangtua tidak proaktif terhadap kegiatan-kegiatan inklusif yang sekolah rencanakan. Sehingga terkadang orangtua menghambat jalannya kegiatan pendidikan inklusif di sekolah.

Kendala-kendala lainnya adalah sekolah belum mampu terbuka pada semua jenis disabilitas dikarenakan sarana prasarana

yang kurang memadai, serta tidak adanya bantuan dana dari pihak luar kecuali Dinas Pendidikan. Hasil wawancara dengan guru kelas (Kamis, 16 Juni 2014) mengatakan yang menjadi kendala adalah guru reguler belum sepenuhnya dapat melaksanakan kurikulum adaptif dan RPI dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pengajaran ABK dan jumlah ABK yang cukup banyak serta jenis ABK yang beragam dalam setiap kelasnya. Selain berdasarkan hasil wawancara, kendala-kendala lain yang dihadapi jika melihat dari tingkat kesenjangan pencapaian kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif adalah belum adanya kegiatan pengembangan bakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ABK, laporan hasil belajar siswa berkebutuhan khusus belum rutin, kebijakan pengulangan kelas bagi ABK disamakan dengan anak normal, dan sekolah tidak menerima dana dari luar Pemerintah (lembaga swasta).

Rangkuman kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta dapat digambarkan dalam tabel 19.

Tabel 19. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Inklusif Bagi ABK di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta

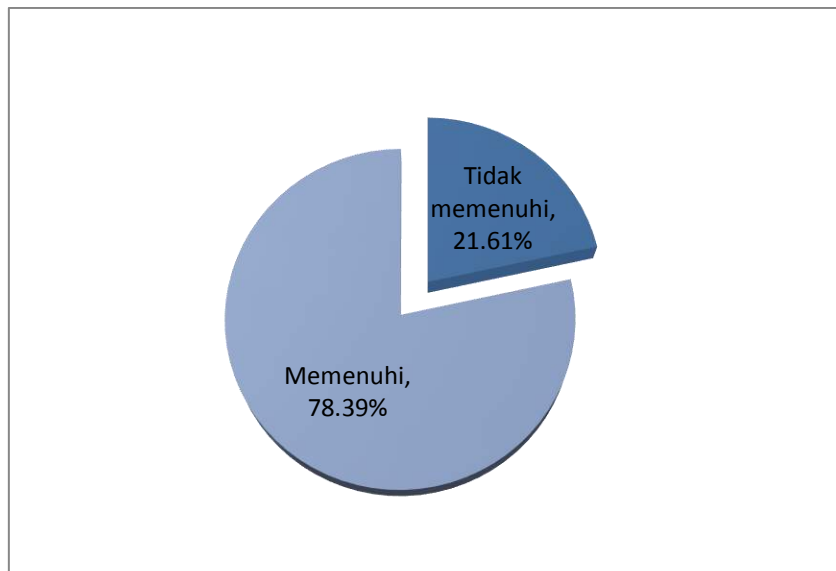
Aspek	Kendala
Standar Isi	Kurangnya jumlah GPK
Standar Proses	Kurangnya kerjasama GPK dan guru kelas
Standar Kompetensi Lulusan	Belum adanya kegiatan pengembangan bakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ABK
Standar Penilaian	Laporan hasil belajar siswa berkebutuhan khusus belum rutin
Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	Kurangnya pemahaman guru kelas terhadap pengajaran ABK dan pendidikan inklusif
Standar Sarana Prasarana	Sarana prasarana belum memadai bagi berbagai jenis disabilitas
Standar Pengelolaan	Kebijakan pengulangan kelas bagi ABK disamakan dengan anak normal
Standar Pembiayaan	Sekolah tidak menerima dana dari luar Pemerintah (lembaga swasta)

Dari keseluruhan kendala yang menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif, sebagian besar kendala yang muncul adalah faktor tenaga pendidik. Di mana jumlah GPK yang tersedia masih kurang dan pemahaman yang guru reguler miliki tentang pendidikan inklusif masih minim.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Ketercapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta

Secara menyeluruh, tingkat pencapaian keterlaksanaan Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif oleh SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, dapat dilihat dalam diagram berikut :



Gambar 10. Diagram Ketercapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta

Berdasarkan tingkat pencapaian secara umum, keterlaksanaan kriteria standar pelayanan minimum oleh SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta mencapai 78,39 % dengan kesenjangan sebesar 21.61 %. Adanya tingkat kesenjangan sebesar 21.61 % dalam pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif dapat diartikan bahwa ada

hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta.

Pada standar isi, pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar isi memenuhi indikator pencapaian sebesar 66.25 %. Hal ini disebabkan tidak sebandingnya jumlah GPK dan ABK di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, maka pengembangan kurikulum adaptif dan RPI bagi seluruh ABK tidak mampu dipenuhi oleh GPK. Kenyataan yang peneliti temui di SD Negeri Bangunrejo 2 ini sesuai dengan pernyataan N. Praptiningrum (2010:38) yang menyatakan bahwa secara umum ketersediaan tenaga pendidik masih belum sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, karena sebagian sekolah inklusif belum memperoleh dukungan guru pembimbing khusus maupun tenaga ahli. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna, karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik (Prastiyono, 2013 : 125). Tidak sebandingnya jumlah GPK dengan ABK di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta yaitu 3 orang GPK dengan 61 orang ABK, berakibat pada tidak dapat terlaksananya pengembangan kurikulum adaptif dan RPI bagi setiap ABK. Karena tidak seluruh siswa berkebutuhan khusus mendapatkan kurikulum adaptif dan RPI membuat sebagian besar anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan kurikulum adaptif dan

RPI, tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajar anak.

Merujuk pada standar proses, kondisi saat ini SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta dalam kapasitasnya sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum mencapai standar proses dari kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif. Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar proses memenuhi indikator pencapaian sebesar 66.25 %. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan standar proses adalah kurangnya peran guru. Baik GPK maupun guru reguler dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Menurut Dieni Laylatul Zakia (2015 : 113) Faktor tenaga pendidik (guru) memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian kualitas pendidikan secara umum. Sehingga kurangnya peran guru dalam temuan penelitian ini berdampak besar dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Faktor penghambat yang muncul pada standar proses tidak jauh berbeda dengan standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta standar pengelolaan di mana permasalahan berorientasi pada kurangnya pemahaman guru maupun sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan adalah kurangnya peran guru baik GPK

maupun guru reguler dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif disebabkan kurangnya pemahaman guru kelas tentang pengajaran terhadap ABK dan pendidikan inklusif itu sendiri. Sedangkan permasalahan dalam pelaksanaan kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif komponen standar pengelolaan adalah pelaksanaan kebijakan sekolah dalam hal pengurangan kelas di mana ABK disamakan dengan anak normal. Permasalahan ini disebabkan kurangnya pemahaman guru maupun sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Apabila dilihat dari temuan-temuan di lapangan, penyebab kurangnya pemahaman guru bukan terletak pada kurangnya pelatihan mengenai pendidikan inklusif, melainkan pada kurangnya kolaborasi antara guru kelas dan GPK dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sehingga guru kelas tidak memiliki pengetahuan mengenai penerapan pendidikan inklusif itu sendiri. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunanto dalam Dieni Laylatul Zakia (2015:112) di antaranya menyatakan bahwa: (1) pada awalnya pembelajaran diterima oleh guru kelas, kini bergeser pada ketergantungan pada guru khusus atau guru pendamping. Hal ini menyebabkan kurangnya peran guru dalam pembelajaran bagi ABK. (2) motivasi, kerjasama dalam mengatasi masalah tidak tampak dan tidak dilakukan melalui kolaborasi sebab seluruh aktivitas belajar ABK dari perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru pendamping. Seyogyanya, guru di sekolah inklusif saling berkolaborasi dalam pelaksanaan program pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Sukinah, (2010:45) bahwa guru bekerja dalam tim, guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga dengan adanya kolaborasi antara guru dengan tim interdisipliner, pembelajaran yang diberikan tidak terkotak-kotak antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus melainkan menerapkan pembelajaran terpadu berdasarkan hasil kolaborasi tim interdisipliner. (3) guru pendamping yang berkualifikasi PLB belum memiliki keberanian untuk meluruskan sesuai konsepnya.

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar kompetensi lulusan memenuhi indikator pencapaian sebesar 88.125 %. Hal ini dikarenakan program pengembangan bakat yang dilaksanakan belum disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing ABK, program masih disamaratakan dengan anak normal. Seyogyanya program pengembangan bakat bagi anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak sesuai dengan tujuan pendidikan inklusi itu sendiri. Menurut Paramita Isabella, Emosda, Siratno, (2014 : 55) Pendidikan inklusif juga bertujuan untuk membangun keterampilan dan bakat alamiah yang dimiliki peserta didik. Tentunya

keterampilan dan bakat alamiah yang dimiliki masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus berbeda-beda. Sehingga program pengembangan bakat seharusnya disesuaikan dengan potensi masing-masing ABK.

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar penilaian memenuhi indikator pencapaian sebesar 83.75 %. Kesenjangan terletak pada guru kelas yang hanya melaporkan perkembangan ABK kepada orangtua murid 2 kali dalam setahun atau setiap pembagian rapor. Laporan perkembangan ABK seharusnya dilaksanakan secara rutin. Menurut Permendiknas No 20 Tahun 2007 laporan hasil belajar perlu disampaikan kepada peserta didik dan peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remidi. Karena anak harus mengetahui nilai hasil belajar yang didapatnya sehingga anak mengetahui sejauh mana kemampuannya pada saat itu. Selain itu dengan anak mengetahui nilai hasil belajarnya, anak dapat menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran remedial apabila nilai yang didapat tidak mencapai KKM. Pemberian nilai hasil belajar kepada siswa maupun orangtua ini juga dapat memotivasi siswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya dan membuat orangtua dapat mengetahui kemampuan dan perkembangan anak serta memotivasi anak dalam belajar.

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar sarana prasarana memenuhi indikator pencapaian sebesar 75 %. Kesenjangan terletak pada minimnya ketersediaan sarana prasarana dan alat peraga atau media pembelajaran di sekolah. Hal ini dapat disebabkan dengan kurangnya dana dan/atau kurangnya kecakapan sekolah dalam mengelola sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah. Berkaitan dengan penggunaan dana, hal ini merujuk kepada pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar pembiayaan. Komponen penilaian standar pembiayaan memenuhi indikator pencapaian sebesar 90.84 %. SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta hanya mendapatkan dana dari Dinas dan tidak mendapatkan dana tambahan dari luar atau dari lembaga swasta. Dikarenakan pihak sekolah tidak berjejaring atau dengan LSM atau lembaga swasta di luar Pemerintah. Menurut Sukinah (2010 : 47) harus ada keterlibatan dan partisipasi orangtua, masyarakat, dan LSM yang lebih luas; harus ada *supporting system*. Dengan adanya kerjasama antara sekolah dengan LSM, maka bertambahlah partisipan pendukung pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Sehingga dapat membantu mendukung ketersediaan sarana prasarana pendidikan inklusif dan program-program pendidikan inklusif di sekolah.

Berdasarkan kendala yang muncul, diketahui bahwa hambatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2

Yogyakarta adalah jumlah GPK yang tersedia masih kurang dan pemahaman yang guru reguler miliki tentang pendidikan inklusif masih minim. Menurut Purwandari (2009) : 7), perlu penyamaan persepsi tentang pendidikan inklusif dari semua elemen, sehingga memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda, dan dapat menyelenggarakan sekolah inklusif dengan prosedur dan langkah yang jelas. Selain itu, hambatan lainnya adalah rendahnya kerjasama antara guru kelas dengan GPK. Purwandari (2009 : 7) menjelaskan bahwa perlu dikembangkan kolaborasi antar tim kerja profesional, sehingga dalam menangani ABK dapat diperoleh solusi yang menguntungkan bagi ABK. Dari pendapat di atas menjelaskan bahwa solusi yang tepat dalam mengatasi kendala yang muncul di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta adalah memberikan pemahaman kepada guru reguler mengenai pendidikan inklusif. Salah satu caranya adalah GPK memberikan dampingan konsultatif kepada guru reguler, serta GPK dan guru reguler melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif telah mencapai nilai 78.49% (kategori sangat baik). Artinya, masih ada standar pelayanan minimum sekolah inklusif yang belum terpenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta

masih terjadi kesenjangan (*discrepancy*). Serta dari kendala yang muncul, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada guru kelas mengenai ABK dan pendidikan inklusif serta melakukan kerjasama antara guru kelas dengan GPK.

2. Solusi Pencapaian Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi ABK, solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

a. Standar isi

Penerimaan peserta didik baru mempertimbangkan kapasitas sekolah dan ketersediaan sumber daya terkait pelaksanaan pembelajaran.

b. Standar Proses

GPK berdiskusi dengan wali kelas anak berkebutuhan khusus terutama dalam penjelasan tentang kondisi anak termasuk menyampaikan implikasi pendidikannya seperti: materi, metode dan media mengajar, serta alat bantu belajar yang berkaitan dengan proses belajar mengajar anak berkebutuhan khusus.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Kepala sekolah mewajibkan GPK dalam merancang kurikulum adaptif dan RPI disertai dengan pengelompokan program pengembangan bakat dan kompensatoris ABK sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan

d. Standar Penilaian

Sekolah mengadakan pertemuan orangtua murid ABK secara rutin, guna melaporkan hasil belajar dan perkembangan siswa berkebutuhan khusus. Misalnya 1 bulan sekali atau setiap caturwulan.

e. Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

GPK memberikan pendampingan konsultatif kepada guru reguler.

f. Standar Sarana Prasarana

Sekolah harus membuat skala prioritas dalam pengadaan sarana prasarana sekolah. Sekolah membuat pengadaan barang dimulai dari re-inventaris barang-barang, mengadakan seleksi terhadap barang-barang yang masih dapat digunakan, membuat *list* pengadaan barang dimulai dari barang yang terpenting dan harus segera dimiliki dan menunjuk seseorang sebagai penanggung jawab dalam pengadaan barang.

g. Standar Pengelolaan

Kepala Sekolah meninjau ulang kebijakan pengulangan kelas yang ada. Karena kondisi dan kemampuan ABK dalam mengikuti pembelajaran di sekolah tidak sama dengan anak normal. Sehingga kebijakan yang diberlakukan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal tidak dapat disamakan.

h. Standar Pembiayaan

Sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga swasta. Selain mendapatkan tambahan dana guna mendukung pengembangan sekolah, jejaring dengan pihak lain juga dapat mendukung pengembangan pendidikan inklusif di sekolah. Seperti LSM, universitas, dan penyedia layanan medis.

Dari berbagai kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan dalam setiap komponen penilaian kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif, solusi utama yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada guru reguler mengenai pendidikan inklusif. Salah satu caranya adalah GPK memberikan dampingan konsultatif kepada guru reguler, serta GPK dan guru reguler melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Data-data yang peneliti peroleh masih bersifat temuan di sekolah SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, dan pengambilan data dilakukan

dengan teknik kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi dalam lingkup sekolah tanpa ada interaksi dengan orang tua siswa, masyarakat dan para ahli pendidikan. Sehingga peneliti hanya bisa menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada di sekolah saja.

2. Subjek penelitian terbatas pada orang-orang yang dianggap bisa memberikan informasi dan hanya melihat data yang ada di sekolah tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, masih banyak informasi yang belum bisa digali dan diungkap sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta.
3. Dalam kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif yang peneliti gunakan, indikator yang tercantum kurang spesifik. Sehingga informasi yang peneliti dapatkan kurang terperinci dalam mengungkap penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta belum sesuai dengan delapan standar pendidikan inklusif, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan,

2. Kendala Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tersedia masih kurang dan minimnya pemahaman guru reguler tentang pendidikan inklusif.

3. Solusi/Masukan guna Pencapaian Kriteria Standar Nasional Pendidikan Inklusif

GPK memberikan dampingan konsultatif kepada guru reguler, serta GPK dan guru reguler melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi ABK di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi DIY bidang PLB, diharapkan untuk menyediakan GPK langsung dari SLB agar dapat menjadi pendamping konsultatif bagi guru reguler.

2. Bagi Kepala Sekolah

Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat meninjau ulang kebijakan pengurangan kelas bagi ABK. Selain itu, diharapkan kepala sekolah dapat mengadakan pertemuan orangtua ABK secara rutin guna melaporkan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus.

3. Guru Kelas dan GPK SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta

Bagi SD Negeri Bangunrejo 2 diharapkan untuk guru reguler bisa bekerjasama dengan GPK dalam merancang dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ABK. Serta mengadakan dampingan konsultatif dari GPK kepada guru reguler.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Toha Muslim & M. Sugiarmun. (1996). *Ortopedi Dalam Pendidikan Anak Tunadaksa*. Bandung : Depdikbud
- Allen, K. Eillen. (1980). *Mainstreaming in Early Childhood Education*. New York, USA : Delmar Publisher Inc.
- Anas Sudijono. (2008). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Budiyanto. (2005). *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta.
- Dedy Kustawan. (2012). *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Jakarta : PT Luxima Metro Media.
- _____. (2013). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta : PT Luxima Metro Media.
- _____. (2013). *Pedoman Penetapan KKM Pendidikan Khusus*. Jakarta : PT Luxima Metro Media
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional*.
- Depdiknas. (2005). *Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang standar nasional pendidikan*.
- Depdiknas. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007, tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif*.
- Depdiknas. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 70 Tahun 2009, tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa*.
- Depdiknas. (2010). *Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan*.
- Dieni Laylatul Zakia. (2015). *Guru Pembimbing Khusus (GPK) : Pilar Pendidikan Khusus*. Surakarta : Prosiding Seminar Nasional Pendidikan USMS.

- Eko putro Widoyoko. (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Endang Mulyatiningsih. (2012). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Yogyakarta : Alfabeta.
- Farida Yusuf Tayibnapsis. (1989). *Evaluasi Program*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fernandes. (1984). *Evaluation of Educational Program*. Jakarta : BP3K.
- Hallahan, D.P., Kauffman, J.M. & Pullen, P. C. (2009). *Exceptional Learners An Introduction to Special Education*. New York : Pearson.
- Kemendiknas. (2010). *Modul Pelatihan Pendidikan Nasional*. Cetakan pertama.
- Lay Kekeh Marthan. (2007). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta : DIRJEN DIKTI.
- McLeskey, Rosenberg, & Westling. (2013). *Inclusion Effective Practices for All Students*. Second Edition. USA : Pearson.
- Maria Purnama Nduru. (2012). *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Kabupaten Sleman*. Yogyakarta:PPS UNY.
- Mohammad Takdir Illahi. (2013). *Pendidikan Inklusif : Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta : Ar Ruzz Media.
- Nani Triani. (2012). *Panduan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta : PT Luxima Metro Media
- N. Praptiningrum. (2010). *Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta : Jurnal Pendidikan Khusus Vol. 7 No. 2.
- Oemar Hamalik. (2006). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Paramita Isabella, dkk. (2014). *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SDN 131/IV Kota Jambi*. Jambi : Tekno-Pedagogi Vol. 4 No.2.
- Permendiknas Tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta : BSNP.
- Prastiyono. (2013). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif*. Surabaya : Jurnal Administrasi Publik Vol. 11 No. 1.

- Purwandari. (2009). *Pendidikan Inklusif : Masalah Ketenagaan dan Peran Serta Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*. Yogyakarta:UNY.
- Redi Susanto. (2012). *Efektivitas Program Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SDN Giwangan*. Yogyakarta : FIP UNY.
- Richard A. Villa & Jacqueline S. Thousand. (2005). *Creating an Inclusive School*. second edition. USA : ASCD
- Riduwan. 2011. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung : Alfabeta.
- Roger A. Pierangelo & George A. Giuliani. (2013). *Assessment in Special Education : A Practical Approach*. Singapore : Pearson.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2009). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Aneka Cipta
- Suharsimi Arikunto & Cepi Safrudin. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Edisi Kedua*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sukinah. (2010). *Manajemen Strategik Implementasi Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta : Jurnal Pendidikan Khusus Volume 7 No. 2.
- Sutjihati Soemantri. (2007). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta : Depdiknas.
- Tim ASB. (2011). *Panduan I : Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusi*. Yogyakarta : Dinas Dikpora DIY dan ASB Indonesia.
- Tim MCPM-AIBEP. (2009). *Modul Training Of Trainer (TOT) Pendidikan Inklusif*. Depdiknas dan MCPM-AIBEP.
- Tin Suharmini. (2009). *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta : Kanwa Publisher.
- UNESCO. (2009). *Merangkul Perbedaan : Perangkat Untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah Terhadap Pembelajaran; Buku Khusus 3*. Jakarta : IDPN Indonesia, ASB, Handicap International, Plan International.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

INSTRUMEN KUESIONER

A. Tujuan

Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2

B. Petunjuk Pengisian

1. Berikut ini terdapat sejumlah pertanyaan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif.
2. Setiap pertanyaan disertai dengan 4 (empat) alternatif jawaban.
3. Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai, dengan memberi tanda check (V) pada kolom jawaban yang telah disediakan.

C. Pertanyaan

Identitas Narasumber

Nama :

Jabatan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

No.	Pertanyaan	Jawaban			
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Apakah sekolah telah memiliki dokumen penunjukkan sekolah sebagai SPPI (sekolah pelaksana pendidikan inklusi)?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Baru akan diajukan	<input type="checkbox"/> Sedang dalam proses	<input type="checkbox"/> Ya, sudah ada
2.	Apakah sekolah telah melakukan asesmen awal untuk merencanakan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Ya, pernah sekali	<input type="checkbox"/> Ya, tetapi tidak setiap tahun	<input type="checkbox"/> Ya, secara sistematis setiap tahun
3.	Berapakah persentase anak berkebutuhan khusus yang mengikuti kurikulum reguler dengan pengembangan adaptasi dan modifikasi? (Perhitungan persentase = jumlah anak yang mendapatkan kurikulum adaptasi dan modifikasi : jumlah anak yang membutuhkan kurikulum adaptasi dan modifikasi berdasarkan asesmen)	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 1-30% ABK	<input type="checkbox"/> 31-70% ABK	<input type="checkbox"/> 71-100% ABK
4.	Berapakah persentase anak berkebutuhan khusus yang memiliki rencana pembelajaran individual (RPI)? (Perhitungan persentase = jumlah anak yang mendapatkan RPI : jumlah anak yang membutuhkan RPI berdasarkan asesmen)	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 1-30% ABK	<input type="checkbox"/> 31-70% ABK	<input type="checkbox"/> 71-100% ABK
5.	Apakah proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kurikulum (adaptasi/modifikasi) dan/atau RPI yang telah di susun?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Kadang-kadang	<input type="checkbox"/> Hampir selalu	<input type="checkbox"/> Selalu
6.	Apakah dalam pembelajaran guru telah melakukan perubahan setting kelas?	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Satu sampai dua kali setahun	<input type="checkbox"/> Satu kali sampai dua kali dalam sebulan	<input type="checkbox"/> Setidaknya setiap

					minggu
7.	Apakah guru telah menyediakan materi belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus?	<input type="checkbox"/> Hanya buku bacaan (sama dengan anak-anak lain)	<input type="checkbox"/> Guru terkadang membawa materi pembelajaran tambahan ke dalam kelas	<input type="checkbox"/> Guru secara rutin membawa materi pembelajaran tambahan ke dalam kelas	<input type="checkbox"/> Guru menyiapkan berbagai materi pembelajaran tambahan untuk masing-masing subjek pengajaran
8.	Apakah guru telah menerapkan strategi dan praktik mengajar yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Ya, untuk satu jenis disabilitas	<input type="checkbox"/> Ya, untuk beberapa jenis disabilitas	<input type="checkbox"/> Ya, untuk semua jenis disabilitas
9.	Apakah guru menerapkan kecakapan berkomunikasi yang sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Ya, untuk satu jenis disabilitas	<input type="checkbox"/> Ya, untuk beberapa jenis disabilitas	<input type="checkbox"/> Ya, untuk semua jenis disabilitas
10.	Apakah latar belakang pendidikan GPK di sekolah?	<input type="checkbox"/> < S1	<input type="checkbox"/> S1 Non Kependidikan	<input type="checkbox"/> S1 Kependidikan	<input type="checkbox"/> S1 PLB
11.	Seberapa sering GPK melakukan kunjungan ke sekolah?	<input type="checkbox"/> Tidak ada GPK	<input type="checkbox"/> 1 kali dalam seminggu	<input type="checkbox"/> 2 kali dalam seminggu	<input type="checkbox"/> Lebih dari 2 kali dalam seminggu
12.	Bagaimanakah GPK memberikan dampingan untuk sekolah?	<input type="checkbox"/> Tidak ada dampingan	<input type="checkbox"/> Mendampingi anak berkebutuhan khusus secara langsung (satu per satu)	<input type="checkbox"/> Mendampingi guru	<input type="checkbox"/> Dampingan konsultatif

13	Apakah semua anak telah mendapatkan dampingan pembelajaran yang optimal?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Hanya untuk 1 jenis disabilitas	<input type="checkbox"/> Hanya untuk beberapa jenis disabilitas	<input type="checkbox"/> Ya, untuk semua jenis disabilitas
14	Apakah anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendampingan teman sebaya?	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> Ya, untuk 1-30% ABK	<input type="checkbox"/> Ya, untuk 31-70% ABK	<input type="checkbox"/> Ya, untuk 71-100% ABK
15	Apakah sekolah secara khusus telah menentukan standar kompetensi lulusan (SKL) untuk anak berkebutuhan khusus?	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> Ya, untuk 1-30% ABK	<input type="checkbox"/> Ya, untuk 31-70% ABK	<input type="checkbox"/> Ya, untuk 71-100% ABK
16	Apakah sekolah mengadakan program pengembangan bakat dan keterampilan untuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan minat dan bakat mereka?	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> Ya, untuk 1-30% ABK	<input type="checkbox"/> Ya, untuk 31-70% ABK	<input type="checkbox"/> Ya, untuk 71-100% ABK
17	Apakah sekolah memberikan program kompensatoris kepada anak berkebutuhan khusus?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Ya, hanya untuk 1 jenis disabilitas	<input type="checkbox"/> Ya, hanya untuk beberapa jenis disabilitas	<input type="checkbox"/> Ya, untuk semua jenis disabilitas
18	Berapakah persentase anak berkebutuhan khusus yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya?	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 1-30% ABK	<input type="checkbox"/> 31-70% ABK	<input type="checkbox"/> 71-100% ABK
19	Apakah sekolah telah menentukan KKM bagi anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya?	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 1-30% ABK	<input type="checkbox"/> 31-70% ABK	<input type="checkbox"/> 71-100% ABK
20	Berapakah persentase anak berkebutuhan khusus yang mengikuti Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (USEK)?	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 1-30% ABK	<input type="checkbox"/> 31-70% ABK	<input type="checkbox"/> 71-100% ABK
21	Berapakah persentase anak berkebutuhan khusus yang mengikuti Ujian Sekolah (USEK) saja?	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 1-30% ABK	<input type="checkbox"/> 31-70% ABK	<input type="checkbox"/> 71-100% ABK

22	Berapakah persentase rata-rata anak berkebutuhan khusus yang lulus UN/USEK setiap tahunnya?	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 1-30% ABK	<input type="checkbox"/> 31-70% ABK	<input type="checkbox"/> 71-100% ABK
23	Apakah semua anak yang lulus USEK mendapatkan STTB yang diterbitkan oleh sekolah?	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 1-30% ABK	<input type="checkbox"/> 31-70% ABK	<input type="checkbox"/> 71-100% ABK
24	Apakah sekolah melaporkan hasil pembelajaran anak berkebutuhan khusus secara rutin kepada orangtua, yang tidak hanya berupa angka/skor namun disertai dengan beberapa komentar naratif?	<input type="checkbox"/> Belum ada komunikasi dengan orangtua	<input type="checkbox"/> Saat pembagian rapor (dua kali setahun)	<input type="checkbox"/> Kadang-kadang bila ada masalah	<input type="checkbox"/> Sebulan sekali
25	Apakah semua pihak terlibat dalam proses penyesuaian/pengembangan penilaian hasil belajar anak berkebutuhan khusus?	<input type="checkbox"/> Tidak terdapat penyesuaian untuk penilaian hasil belajar anak	<input type="checkbox"/> Kadang-kadang	<input type="checkbox"/> Hampir selalu	<input type="checkbox"/> Selalu
26	Berapakah pelatihan yang pernah diikuti oleh setidaknya satu guru reguler di sekolah?	<input type="checkbox"/> Belum ikut pelatihan	<input type="checkbox"/> Ikut 1-5 topik	<input type="checkbox"/> Ikut 6-10 topik	<input type="checkbox"/> Semua topik
27	Apakah pelatihan yang pernah diikuti tersebut telah disebarluaskan?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Sudah, untuk sebagian guru sekolah	<input type="checkbox"/> Sudah, untuk semua guru sekolah	<input type="checkbox"/> Sudah, untuk guru di sekolah dan sekolah lain
28	Apakah sudah ada sarana prasarana yang disediakan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus?	<input type="checkbox"/> Belum ada	<input type="checkbox"/> Hanya untuk satu jenis disabilitas	<input type="checkbox"/> Untuk beberapa jenis disabilitas	<input type="checkbox"/> Untuk semua jenis disabilitas
29	Apakah sekolah terbuka terhadap semua anak tanpa memandang jenis disabilitas mereka? (Penerimaan siswa berkebutuhan khusus)	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Terbuka hanya pada satu jenis disabilitas	<input type="checkbox"/> Terbuka hanya pada beberapa jenis disabilitas	<input type="checkbox"/> Terbuka pada semua jenis

				tertentu	disabilitas
30	Apakah komponen pendidikan inklusi sudah dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Dalam perencanaan	<input type="checkbox"/> Sudah ada secara tertulis namun belum terlaksana	<input type="checkbox"/> Telah terlaksana
31	Apakah sekolah memiliki seorang koordinator/manajer pendidikan inklusif?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Sedang direncanakan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Ada dan aktif
32	Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait pengulangan kelas bagi anak berkebutuhan khusus?	<input type="checkbox"/> Disamakan dengan anak-anak lain	<input type="checkbox"/> Terdapat kebijakan kelas percobaan	<input type="checkbox"/> Setidaknya dalam 3 tahun anak tidak dikenai pengulangan kelas	<input type="checkbox"/> Anak berkebutuhan khusus tidak dikenai pengulangan kelas
33	Apakah terdapat orangtua anak berkebutuhan khusus dalam keanggotaan komite sekolah?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Sedang dalam pembahasan	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Ada dan aktif
34	Apakah kepala sekolah melaporkan secara rutin data anak berkebutuhan khusus kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Kadang-kadang	<input type="checkbox"/> Hampir selalu	<input type="checkbox"/> Secara rutin
35	Apakah sekolah telah berjejaring dengan stakeholder?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Kadang-kadang	<input type="checkbox"/> Secara rutin	<input type="checkbox"/> Terdapat MoU yang telah ditandatangani
36	Apakah sekolah melakukan kerjasama dengan sekolah jenjang di atasnya guna memastikan kelanjutan layanan pendidikan yang sesuai	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Tergantung permintaan	<input type="checkbox"/> Tercantum dalam rencana kegiatan sekolah	<input type="checkbox"/> Ya, selalu terlaksana

	dengan anak berkebutuhan khusus?				
37	Apakah komponen pendidikan inklusif telah tercantum di dalam dokumen RAPBS/RAKS?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Sedang dalam pembicaraan	<input type="checkbox"/> Tidak setiap tahun	<input type="checkbox"/> Ya, setiap tahunnya
38	Bagaimana dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah?	<input type="checkbox"/> Dukungan belum ada	<input type="checkbox"/> Dukungan dalam proses	<input type="checkbox"/> Ya, namun tidak rutin	<input type="checkbox"/> Ya, secara rutin
39	Apakah sekolah menerima bantuan fisik (media pembelajaran, sarana prasarana, dll) secara rutin?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Kadang-kadang	<input type="checkbox"/> Hampir selalu	<input type="checkbox"/> Secara rutin
40	Apakah sekolah menerima dana tambahan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif dari pemerintah?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Sedang diajukan	<input type="checkbox"/> Ya, namun tidak secara rutin	<input type="checkbox"/> Ya, secara rutin
41	Apakah sekolah menerima dana tambahan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif dari luar?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Sedang diajukan	<input type="checkbox"/> Ya, namun tidak secara rutin	<input type="checkbox"/> Ya, secara rutin
42	Apakah sekolah melaporkan penggunaan dana subsidi secara sistematis?	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="checkbox"/> Kadang-kadang	<input type="checkbox"/> Satu tahun sekali	<input type="checkbox"/> Sudah sistematis

Lampiran 2.

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati kegiatan belajar mengajar dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2, meliputi:

A. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2.

B. Aspek yang diamati :

Aspek yang diamati	Hasil Pengamatan
Pengembangan kurikulum dan RPI	
Setting kelas	
Materi belajar ABK	
Strategi mengajar kepada ABK	
Kecakapan berkomunikasi dengan ABK	
Pendampingan pembelajaran ABK	
Pendampingan teman sebaya	
Bimbingan pemahaman materi	
Ketersediaan sarana prasarana	

Yogyakarta,

Observer

Latifa Garnisti Rifani

Lampiran 3.

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH

A. Tujuan

Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2

B. Pertanyaan

Identitas Narasumber

Nama :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

1. Jenis asesmen apa saja yang telah dilakukan?
2. Siapa saja yang berperan dalam melakukan pendampingan kepada peserta didik berkebutuhan khusus?
3. Pelatihan pendidikan inklusif apa saja yang pernah guru ikuti?
4. Apa saja sarana prasarana yang telah sekolah sediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus?
5. Apa saja stakeholder yang telah berjejaring dengan sekolah?
6. Dari RAPBS/RAKS yang telah disusun, apakah tujuan penganggaran yang dilakukan bagi komponen pendidikan inklusif?
7. Darimana saja sekolah menerima dana tambahan, baik dari Dinas maupun lembaga swasta?
8. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelenggaraan pendidikan sekolah inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?

Lampiran 4.

PEDOMAN WAWANCARA GURU KELAS

A. Tujuan

Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2

B. Pertanyaan

Identitas Narasumber

Nama :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

1. Bagaimana bentuk setting kelas yang diterapkan?
2. Siapa saja yang berperan dalam melakukan pendampingan kepada peserta didik berkebutuhan khusus?
3. Bagaimana penerapan kurikulum adaptif dan/atau RPI dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi ABK ?
4. Bagaimana proses evaluasi dan/atau penilaian hasil belajar ABK ?
5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penilaian hasil belajar anak?
6. Pelatihan pendidikan inklusif apa saja yang pernah guru ikuti?
7. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelenggaraan pendidikan sekolah inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?

Lampiran 5.

PEDOMAN WAWANCARA GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK)

A. Tujuan

Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2

B. Pertanyaan

Identitas Narasumber

Nama :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

1. Jenis asesmen apa saja yang telah dilakukan?
2. Bagaimana bentuk setting kelas yang diterapkan?
3. Siapa saja yang berperan dalam melakukan pendampingan kepada peserta didik berkebutuhan khusus?
4. Bagaimana pembelajaran akomodatif bagi anak berkebutuhan khusus di kelas ?
5. Bagaimana modifikasi yang dilakukan pada pengembangan kurikulum adaptif dan/atau RPI bagi ABK ?
6. Apakah sekolah memberikan program pengembangan bakat bagi peserta didik berkebutuhan khusus? Jika iya, program pengembangan bakat apa yang sekolah berikan?
7. Apakah sekolah memberikan program kompensatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus? Jika iya, program kompensatoris apa yang sekolah berikan?
8. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penilaian hasil belajar anak?
9. Pelatihan pendidikan inklusif apa saja yang pernah guru ikuti?

10. Apa saja sarana prasarana yang telah sekolah sediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus?
11. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelenggaraan pendidikan sekolah inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?

Lampiran 6. Data Jawaban Responden Instrumen Kuesioner

Tabel 20. Data Jawaban Responden Instrumen Kuesioner

Indikator Pencapaian	Nomor Butir	Jawaban Responden										Skor Total	Skor Max
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	40
	4	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	23	40
2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
3	5	3	3	2	3	4	3	4	2	2	4	30	40
4	6	4	3	2	4	3	3	4	2	2	4	31	40
5	7	4	2	2	4	2	2	2	2	2	4	26	40
6	8	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29	40
7	9	4	4	3	4	4	4	4	3	2	4	36	40
8	14	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	23	40
9	16	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	26	40
	17	2	2	3	2	4	2	4	3	2	3	27	40
10	22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
11	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
12	15	2	2	4	2	3	2	3	4	2	4	28	40
	19	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	33	40
13	20	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	28	40
	21	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	23	40
14	23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
15	24	3	2	2	3	4	2	4	2	3	4	29	40
16	25	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31	40
17	26	2	3	4	2	2	3	2	4	3	3	28	40
18	27	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	33	40
19	10	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38	40
	11	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	35	40
	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	40
	13	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29	40
20	28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	40	
21	29	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29	40
22	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
23	31	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	36	40
24	32	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	13	40
25	33	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39	40
26	34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
27	35	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	36	40
	36	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	38	40
28	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40

	38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40
	39	2	4	3	2	2	4	2	3	3	3	28	40
29	37	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	38	40
30	40	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	34	40
	41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	40
	42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	40

Lampiran 7. Tingkat Pencapaian dan Tingkat Kesenjangan Indikator Pencapaian

Tabel 21. Persentase Tingkat Pencapaian dan Tingkat Kesenjangan Indikator Pencapaian

Indikator Pencapaian	Nomor Butir	Skor Total	Skor Max	Tingkat Pencapaian (%)	Tingkat Kesenjangan (%)
1	3	30	40	66.25 %	33.75 %
	4	23	40		
2	2	40	40	100 %	0 %
3	5	30	40	75 %	25 %
4	6	31	40	77.5 %	22.5 %
5	7	26	40	65 %	35 %
6	8	29	40	72.5 %	27.5 %
7	9	36	40	90 %	10 %
8	14	23	40	57.5 %	42.5 %
9	16	26	40	66.25 %	33.75 %
	17	27	40		
10	22	40	40	100 %	0 %
11	18	40	40	100 %	0 %
12	15	28	40	76.25 %	23.75 %
	19	33	40		
13	20	28	40	63.75 %	36.25 %
	21	23	40		
14	23	40	40	100 %	0 %
15	24	29	40	72.5 %	27.5 %
16	25	31	40	77.5 %	22.5 %
17	26	28	40	70 %	30 %
18	27	33	40	82.5 %	17.5 %
19	10	38	40	76.25 %	23.75 %
	11	35	40		
	12	20	40		
	13	29	40		
20	28	30	40	75 %	25 %
21	29	29	40	72.5 %	27.5 %
22	30	40	40	100 %	0 %
23	31	36	40	90 %	10 %
24	32	13	40	32.5 %	67.5 %
25	33	39	40	97.5 %	2.5 %
26	34	40	40	100 %	0 %
27	35	36	40	92.5 %	7.5 %

	36	38	40		
28	1	40	40	100 %	0 %
	38	40	40		
	39	28	40		
29	37	38	40	95 %	5 %
30	40	34	40	86.67 %	13.33 %
	41	30	40		
	42	40	40		

Lampiran 8.

HASIL OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati kegiatan belajar mengajar dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2, meliputi:

A. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2.

B. Aspek yang diamati :

Aspek yang diamati	Hasil Pengamatan
Pengembangan kurikulum dan RPI	Tidak ada modifikasi, baik kurikulum maupun RPI. Materi, tujuan, proses, dan evaluasi disamakan dengan anak normal.
Setting kelas	<i>Letter U dan teater</i>
Materi belajar ABK	Tidak dibedakan. ABK menerima materi belajar yang sama dengan anak normal lainnya.
Strategi mengajar kepada ABK	Tidak ada strategi khusus dalam mengajar ABK. Guru mengajar seperti biasa dan ABK didampingi sepenuhnya oleh GPK dan <i>peer tutor</i>
Kecakapan berkomunikasi dengan ABK	Seluruh GPK dan guru kelas mampu berkomunikasi secara baik dan lancar dengan ABK.
Pendampingan pembelajaran ABK	ABK didampingi oleh GPK, orangtua, dan <i>peer tutor</i> .
Pendampingan teman sebaya	ABK didampingi oleh teman sebangku, teman sebangku mampu membantu ABK selama pelajaran. Seperti menjelaskan pelajaran, menunjukkan halaman buku bagi <i>low vision</i> , membantu menggambar garis

	dan/atau bangun datar bagi <i>Cerebral Palsy Spastik</i> .
Bimbingan pemahaman materi	GPK maupun peer tutor memberikan penjelasan tambahan mengenai materi yang ABK tidak mengerti. Guru kelas juga terkadang mengulangi penjelasan apabila ABK belum paham.
Ketersediaan prasarana sarana	Sarana prasarana bagi ABK masih sangat kurang. Sekolah hanya memiliki kursi roda, jalan yang landai dan kamar mandi khusus disabilitas. Sedangkan sarana prasarana lainnya sudah cukup, sekolah sudah memiliki ruang kelas yang baik, perpustakaan, mushola, dan lapangan walaupun kecil. Akan tetapi ruang kepala sekolah dan ruang guru masih digabung. Sekolah telah memiliki ruang sumber bagi ABK, namun telah beralih fungsi menjadi ruang tata usaha.

Yogyakarta,

Observer

Latifa Garnisti Rifani

Lampiran 9.

HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH

A. Tujuan

Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2

B. Pertanyaan

Identitas Narasumber

Nama : Ant. Retno Sriningsih, M.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

Pendidikan Terakhir : S2

1. Jenis asesmen apa saja yang telah dilakukan?

Jawab :

Ada asesmen akademik dan psikologi. Asesmen psikologinya tes IQ oleh psikolog.

2. Siapa saja yang berperan dalam melakukan pendampingan kepada peserta didik berkebutuhan khusus?

Jawab :

Semua terlibat, guru, GPK, orangtua dan saya juga ikut terlibat.

3. Pelatihan pendidikan inklusif apa saja yang pernah guru ikuti?

Jawab :

Ada banyak. Semua pelatihan pasti ikut, tidak pernah terlewat.

4. Apa saja sarana prasarana yang telah sekolah sediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus?

Jawab :

Sekolah memiliki kursi roda, jalan yang sudah dibuat landai itu, ada juga kamar mandi untuk disabilitas.

5. Apa saja stakeholder yang telah berjejaring dengan sekolah?

Jawab :

Sekolah bekerjasama dengan SMP PGRI Yogyakarta, sekolah yang ditunjuk langsung oleh Dinas sebagai sekolah lanjutan bagi ABK setelah lulus dari SD ini.

6. Dari RAPBS/RAKS yang telah disusun, apakah tujuan penganggaran yang dilakukan bagi komponen pendidikan inklusif?

Jawab :

Anggaran dana inklusif biasanya untuk sarana prasarana dan SDM-nya yaitu guru pembimbing khusus. Dana juga dianggarkan untuk kegiatan keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus, untuk membeli bahan dan peralatannya.

7. Darimana saja sekolah menerima dana tambahan, baik dari Dinas maupun lembaga swasta?

Jawab :

Sekolah hanya menerima dana dari Dinas saja.

8. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelenggaraan pendidikan sekolah inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?

Jawab :

Kendalanya beberapa orangtua tidak proaktif terhadap kegiatan-kegiatan inklusif yang sekolah rencanakan. Justru mengganggu.

Lampiran 10.

HASIL WAWANCARA GURU KELAS

A. Tujuan

Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2

B. Pertanyaan

Identitas Narasumber

Nama : Sulastri, S.Pd

Jabatan : Guru Kelas V

Pendidikan Terakhir : S1

1. Bagaimana bentuk setting kelas yang diterapkan?

Jawab :

Bentuk setting kelasnya yang biasa nya itu (teater), kolom baris dan *letter U* juga.

2. Siapa saja yang berperan dalam melakukan pendampingan kepada peserta didik berkebutuhan khusus?

Jawab :

GPK, guru kelas, orangtua, semuanya berperan. Tapi yang paling utama ya guru pembimbing khususnya.

3. Bagaimana penerapan kurikulum adaptif dan/atau RPI dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi ABK ?

Jawab :

Saya mengajarnya biasa saja, seperti halnya mengajar anak normal lainnya. Tidak mengikuti kurikulum khusus atau RPI itu, karena akan

menyulitkan KBM. Anak berkebutuhan khusus menjadi tanggung jawab GPK yang mendampingi di kelas.

4. Bagaimana proses evaluasi dan/atau penilaian hasil belajar ABK ?

Jawab :

Untuk ABK nilainya dibuat standar KKM saja, karena anak tidak mungkin mencapai KKM. Saat ujian atau ulangan juga soalnya sama semua, tetapi untuk remedialnya bagi ABK dibedakan. Soal remedial yang membuat GPK. Soal US juga yang membuat GPK. Jadi hanya soal remedial dan perlakuan saat ujian yang dibedakan. Seperti didampingi atau diberi waktu lebih saat ujian. Untuk ABK juga tidak diranking secara reguler, dirankingnya khusus siswa-siswi ABK.

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penilaian hasil belajar anak?

Jawab :

Saya dan guru pembimbingnya terkadang *sharing* mengenai perkembangan anak-anak, biasanya sebulan sekali. Saya juga menerima laporan perkembangan harian berupa tulisan setiap hari. Tapi penilaian sepenuhnya dari guru kelas.

6. Pelatihan pendidikan inklusif apa saja yang pernah guru ikuti?

Jawab :

Ada banyak sekali, pelatihannya bergiliran, tergantung siapa yang luang. Yang paling baru ini saya mengikuti pelatihan tentang modifikasi dan akomodasi.

7. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelenggaraan pendidikan sekolah inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?

Jawab :

Kendala yang saya rasakan, guru reguler belum bisa melaksanakan kurikulum adaptif dan RPI karena kurang paham tentang pengajaran ABK yang baik bagaimana dan jumlah ABK-nya kan banyak, jenisnya juga beragam. Jadi saya mengajar seperti biasa saja, ABK menjadi tanggung jawab GPK. Hanya saja terkadang saya bertanya ke anak sudah paham atau belum, jika anak belum paham biasanya saya jelaskan ulang.

Lampiran 11.

HASIL WAWANCARA GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK)

A. Tujuan

Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2

B. Pertanyaan

Identitas Narasumber

Nama : Noerani Misyriana. H, S.Pd

Jabatan : GPK

Pendidikan Terakhir : S1-PLB

1. Jenis asesmen apa saja yang telah dilakukan?

Jawab :

Ada asesmen akademik dan psikologi. Asesmen akademik biasanya berupa tes IQ dan itu psikolog yang melakukannya. Jadi begitu anak mendaftar, GPK yang melakukan asesmen akademiknya dan psikolog di hari berikutnya, dijadikan satu seluruh anak yang mendaftar biar sekalian saja gitu. Yang diasesmen itu seluruh peserta didik baru kelas 1, murid baru pindahan, dan murid yang sekiranya membutuhkan asesmen ulang.

2. Bagaimana bentuk setting kelas yang diterapkan?

Jawab :

Bentuk setting kelas biasanya *letter U*, sama bentuk seperti biasa sekarang ini (*teater*). Biasanya setting kelas digantinya setiap awal semester saja.

3. Siapa saja yang berperan dalam melakukan pendampingan kepada peserta didik berkebutuhan khusus?

Jawab :

Semuanya berperan, mulai dari GPK itu sendiri, guru kelas juga ikut mendampingi, ada *peer tutor* teman sebaya juga, biasanya teman sebangkunya dan beberapa orangtua juga ada yang mendampingi .

4. Bagaimana pembelajaran akomodatif bagi anak berkebutuhan khusus di kelas ?

Jawab :

Didampingi total setiap hari.

5. Bagaimana modifikasi yang dilakukan pada pengembangan kurikulum adaptif dan/atau RPI bagi ABK ?

Jawab :

Tidak ada yang dimodifikasi, hanya pada bagian evaluasi yang dimodifikasi. Seperti soal yang diturunkan jumlah dan tingkat kesulitannya, serta pendampingan baik saat pembelajaran maupun evaluasi. Ada penambahan waktu juga terhadap beberapa jenis disabilitas seperti *Slow Learner*.

6. Apakah sekolah memberikan program pengembangan bakat bagi peserta didik berkebutuhan khusus? Jika iya, program pengembangan bakat apa yang sekolah berikan?

Jawab :

Iya sekolah berikan, bentuknya adalah *live skill*. Seperti masak, membatik, bengkel, kerajinan *flannel*, ada juga gerabah dan belajar langsung ke kasongan itu, sama ada kerajinan merangkai manik-manik untuk dijadikan gelang dan bros.

7. Apakah sekolah memberikan program kompensatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus? Jika iya, program kompensatoris apa yang sekolah berikan?

Jawab:

Iya dulu pernah ada program kompensatoris, tapi sekarang sudah tidak. Karena anak-anak berkebutuhan khusus yang diampu sekarang perkembangan dan kemandiriannya sudah baik. Dulu itu pernah ada ADL mandi untuk anak tunagrahita, yak arena anaknya sudah bisa jadi tidak diajarkan lagi.

8. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penilaian hasil belajar anak?

Jawab :

Yang melakukan penilaian guru kelas dan GPK. Jadi GPK memberikan laporan penilaian perkembangan masing-masing ABK ke guru kelas setiap hari. Nah dari laporan itu dan hasil belajar anak yang guru kelas jadikan penilaian.

9. Pelatihan pendidikan inklusif apa saja yang pernah guru ikuti?

Jawab :

Sudah banyak sekali yang guru-guru ikuti, hanya saja berganti-gantian antar guru maupun GPK, yang waktunya luang saja yang ditunjuk untuk mewakili sekolah ikut pelatihan. Pelatihan yang terakhir ada dari seminar Nasional tentang pendidikan inklusif, ada juga penerapan *peer tutor*, modifikasi dan akomodasi, ada juga tentang kurikulum adaptif dan RPI/PPI. Banyak sekali yang sudah sekolah ikuti, setiap ada pelatihan pasti ada salah satu guru yang berangkat.

10. Apa saja sarana prasarana yang telah sekolah sediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus?

Jawab :

Seperti yang bisa dilihat, jalan-jalan di sekolah sudah dibuat landai, sekolah juga sudah memiliki kursi roda dan kamar mandi khusus untuk pengguna kursi roda.

11. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelenggaraan pendidikan sekolah inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2?

Jawab :

Kendala yang saya rasakan itu guru pembimbing khususnya kurang. Sedangkan murid berkebutuhan khususnya banyak, sehingga saya sebagai GPK sering merasa kewalahan dalam menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus yang banyak ini.

Lampiran 12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta : Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta Tahun 2014

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hayam Wuruk 11 Yogyakarta Telp. (0274) 512956, 563078 Yk. Kode Pos 55212

E-mail : pendidikan@jogja.go.id E-mail Intranet : pendidikan@intra.jogja.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR :188/661
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan untuk meningkatkan profesionalisme dalam manajemen Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta maka perlu ditetapkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta No 37 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta;
- Memperhatikan** : Permendiknas Republik Indonesia No: 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) Kota Yogyakarta tahun 2014 (daftar terlampir);
- Kedua** : Tugas Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi di Sekolah masing masing;
 2. Menyelenggarakan Pembelajaran yang ramah dan terbuka terhadap Anak Berkebutuhan Khusus;
 3. Melaksanakan kerjasama dengan stake holder Pendidikan Inklusi untuk meningkatkan pelayanan pada anak berkebutuhan khusus di sekolahnya;

4. Melakukan rujukan ke instansi yang kompeten bila terjadi kesulitan dalam proses pemberian layanan pembelajaran maupun layanan perilaku bagi anak berkebutuhan khusus di sekolahnya;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 12 Juni 2014

Kepala,

Drs. EDY HERI SUASANA, M.Pd.

NIP. 19610605 198401 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Kemdikbud;
2. Walikota Yogyakarta
3. Kepala Dikpora DIY
4. Kepala Bidang PLB Dikdas Dikpora DIY
5. Yang bersangkutan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hayam Wuruk 11 Yogyakarta Telp. (0274) 512956, 563078 Yk. Kode Pos 55212

E-mail : pendidikan@jogja.go.id E-mail Intranet : pendidikan@intra.jogja.go.id

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota

Yogyakarta

Nomor : 188/661

Tanggal : 12 Juni 2014

Tentang : **PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA
PENDIDIKAN INKLUSI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2014**

**DAFTAR SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI (SPPI) KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2014**

NO	NAMA SEKOLAH
1	PAUD Among Siwi Umbulharjo
2	PAUD Bunga Indah 09 Terban Gondokusuman
3	PAUD Ceria 21 Gedongtengen
4	PAUD Tiara Surya Tegalrejo
5	PAUD Among Putro Tegalrejo
6	TK ABA Nitikan
7	SD Negeri Baciro
8	SD Negeri Giwangan
9	SD Negeri Karanganyar
10	SD Negeri Bangunrejo II
11	SD Taman Muda Ibu pawiyatan
12	SD Negeri Tamansari 1
13	SD Tumbuh 1
14	SD Blunyahrejo
15	SD Ungaran 1 (CIBI)
16	SD Muhammadiyah Sagan
17	SDN Pakel
18	SDN Minggiran
19	SDN Wirosaban
20	SDN Mendungan 1
21	SD Muhammadiyah Miliran

Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian



Ruang Kelas



Halaman Sekolah



Gedung Mushola



Jalan yang Landai Bagi ABK Pengguna Kursi Roda



Gedung Perpustakaan



Suasana Belajar di Dalam Kelas



Kegiatan Pengembangan Bakat (Live Skill Membuatik)



GPK yang Mendampingi ABK di Dalam Kelas

Lampiran 14. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 540611 pesawat 405, Fax (0274) 5406611
Laman: fip.uny.ac.id, E-mail: humas fip@uny.ac.id

Nomor : 3276 /UN34.11/PL/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan izin Penelitian

2 Juni 2016

Yth. Walikota Yogyakarta
Cq. Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165
Telp (0274) 555241 Fax. (0274) 555241
Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Latifa Garnisti Rifani
NIM : 12103241037
Prodi/Jurusan : PLB/PLB
Alamat : Gancangan VI RT 03 RW 013 Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : SD Negeri Bangunrejo 2
Subyek : Kepala sekolah, Guru kelas, GPK
Obyek : Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif
Waktu : Juni- Agustus 2016
Judul : Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri Bangunrejo 2

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FIP
3. Ketua Jurusan PLB FIP
4. Kabag TU
5. Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta



Dekan,
Dr. Haryanto, M. Pd.
NIP196009021987021001



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2260

4249 /34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Ilmu Pendidikan - UNY
Nomor : 3276/UN34.11/PL/2016 Tanggal : 2 Juni 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : LATIFA GARNISTI RIFANI
No. Mhs/ NIM : 12103241037
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ilmu Pendidikan - UNY
Alamat : Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD NEGERI BANGUNREJO 2
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 7 Juni 2016 s/d 7 September 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

LATIFA GARNISTI RIFANI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 08 Juni 2016



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
3. Kepala SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta
4. Dekan Fak. Ilmu Pendidikan - UNY
5. Ybs.

Lampiran 15. Surat Keterangan Penelitian

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH DASAR WILAYAH BARAT
SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO 2
Bangunrejo, RT56 RW13, Yogyakarta, Kode Pos.55242Telpon (0274) 557124
HOTLINE SMS SEKOLAH : 081229725644 EMAIL : sdbangunrejo2@yahoo.co.id
HOT LINE SMS UPIK : 8122780001 HOT LINE EMAIL : upik@loqjakota.go.id
WEB SITE : www.loqjakota.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 421.2/006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Bangunrejo 2, menerangkan bahwa :

N a m a : M NINIK MURDIASTUTI, S.Pd.
NIP : 19610610 199103 2 005

Menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan identitas sebagai berikut:

Nama	NIM	Jurusan
LATIFA GARNISTI RIFANI	12103241037	PENDIDIKAN LUAR BIASA

Telah melakukan penelitian berupa pengambilan data yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk keperluan skripsi dengan judul "*Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta*" dengan studi kasus pada anak di SD N Bangunrejo 2 Yogyakarta pada Tanggal 13 Juni s.d 23 juli 2016.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2016
Kepala SD Negeri Bangunrejo 2

M. NINIK MURDIASTUTI, S.Pd.
NIP. 19610610 199103 2 005


SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN